



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN III**

**Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Sebagai
Pengampu Program Nasional Terkait Ketahanan**

Disusun oleh:

Nama	: Susi Munikasari, S.E.,
NIP	: 199105312025042007
Jabatan	: Perencana Ahli Pertama
Instansi	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai
Kelas/Kelompok	: II
No. Absen	: A21.2.16
Angkatan	: 21

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
REGIONALBUKITTINGGI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

2025

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN AKTUALISASI

JUDUL : Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota
Dumai Sebagai Pengampu Program Nasional
Terkait Ketahanan Pangan
NAMA : Susi Munikasari, S.E.,
NIP : 199105312025042007
PANGKAT/GOL. : PENATA MUDA/IIa
INSTANSI : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Dumai
ANGKATAN/KELOMPOK : 21/II
NO. ABSEN : A21.2.16

Disahkan berdasarkan Seminar Aktualisasi yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 2025 di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri Regional Bukittinggi.

Bukittinggi, 7 November 2025

Coach,

Penguji,

Ratna Sriwina, S.E., M.Si.,
NIP. 19750813 200801 2 001

Khairurrijal, S.IP., M.Si.,
NIP. 19880414 200701 1 001

Mengetahui
Kepala Pusat
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri
Regional Bukit Tinggi

SARJAYADI, SS, M.AP
NIP. 19700304 199603 1 001

BERITA ACARA
SEMINAR LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Pada Hari : Jumat
Tanggal : 7 November 2025
Pukul : 08.00 - 17.00 WIB
Tempat : PPSDM Regional Bukittinggi

Telah Diseminarkan Laporan Aktualisasi Latsar CPNS Angkatan XXI Tahun 2025

Dan telah
JUDUL : Evaluasi Capaian IKU DKPP Kota Dumai
Sebagai Pengampu Program Nasional Terkait
Ketahanan Pangan
NAMA : Susi Munikasari, S.E.,
NIP : 199105312025042007
PANGKAT/GOL. : Penata Muda/IIa
JABATAN : Perencana Ahli Pertama
INSTANSI : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Dumai
ANGKATAN/KELOMPOK : 21/II
NO. ABSEN : A21.2.16

mendapat pengujian/komentar/masukan/sasaran dari Penguji, Mentor dan Coach/Moderator.

COACH

(Ratna Sriwina, S.E., M.Si.,)
NIP. 19750813 200801 2 001

PENGUJI

(Khairurrijal, S.IP., M.Si.,)
NIP.19880414 200701 1 001

PESERTA


(Susi Munikasari, S.E.,)
NIP. 19910531 202504 2 007

MENTOR


(Insani Taqwa Saili, S.T.,)
NIP. 19870929 201001 1 006

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan aktualisasi dengan judul *“Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Sebagai Pengampu Program Nasional Terkait Ketahanan Pangan”* sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) Tahun 2025.

Laporan ini disusun sebagai bentuk refleksi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan aktualisasi nilai-nilai dasar ASN, khususnya dalam mewujudkan integritas, profesionalitas, dan orientasi pelayanan publik melalui evaluasi kinerja instansi. Fokus utama kegiatan ini adalah menganalisis capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai dalam mendukung program nasional terkait ketahanan pangan, serta mengidentifikasi gap dan potensi permasalahan yang menghambat pencapaian target strategis.

Dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi latsar CPNS 2025 ini, saya banyak mendapat dukungan, arahan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, saya ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Sarjadi, S.S., M.AP selaku Kepala PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi atas dukungan dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.

2. Bapak Drs. Budhi Hasnul, M.Si., selaku Kepala Bappeda yang telah memberikan izin, dukungan, dan ruang untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi.
3. Bapak Insani Taqwa Saili, S.T. selaku Mentor atas pendampingan, arahan, dan dukungan serta motivasi yang diberikan, selama proses aktualisasi ini berlangsung.
4. Ibu Ratna Sriwina, S.E., M. Si, selaku *Coach* atas bimbingan, arahan, dan kesabaran selama proses aktualisasi ini berlangsung.
5. Seluruh Subkor Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, terutama Bu Hj. Evi Kaptinora, S.Pi., selaku subkor langsung penulis, atas kesabaran, bimbingan, dan arahannya selama proses aktualisasi ini berlangsung.
6. Seluruh senior dan rekan-rekan saya di Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.
7. Seluruh Widyaiswara atas ilmu, arahan, dan inspirasi yang telah diberikan selama proses pelatihan dasar.
8. Seluruh panitia pelatihan dari PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi atas penyelenggaraan kegiatan yang tertib, profesional, dan penuh semangat pembelajaran.
9. Seluruh keluarga atas doa, dukungan, dan pengertian selama proses pelatihan dan aktualisasi ini berlangsung.

Saya menyadari bahwa laporan pelaksanaan aktualisasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan

demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja perencanaan di instansi saya, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan yang lebih baik dan berkelanjutan.

Dumai, 25 Oktober 2025

Peserta

Susi Munikasari, S.E.,

NIP. 199105312025042007

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN RANCANGAN AKTUALISASI	i
BERITA ACARA	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	5
C. Manfaat Aktualisasi	6
D. Ruang Lingkup	6
BAB II PROFIL INSTANSI DAN PESERTA	8
A. Profil Instansi	8
B. Profil Peserta	20
C. Role Mode	Error! Bookmark not defined.
D. Tugas Jabatan dan Ruang Lingkup Kegiatan	20
BAB III RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI	23
A. Deskripsi Core Isu	23
B. Analisis Core Isu	24
C. Gagasan kreatif Penyelesaian Core Isu	26
BAB IV CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI	28
A. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi	28
B. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi	29
C. Matrik Rekapitulasi Realisasi Habituasi NND PNS (BerAKHLAK)	37
D. Capaian Penyelesaian Core Isu	38
E. Manfaat Terselesaikannya Core Isu	39
F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi	41
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	42
A. Kesimpulan	42
B. Rekomendasi	44
DAFTAR PUSTAKA	46

LAMPIRAN.....	47
----------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. 1 Beberapa isu strategis terkait ketahanan pangan di Kota Dumai ..	3
Tabel 3. 1 Matrik APKL (Aktual, Problematik, Kekhalayakan, Kelayakan)	Error!
Bookmark not defined.	
Tabel 4. 1 Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi	28
Tabel 4. 2 Matrik Pelaksanaan Aktualisasi	29
Tabel 4. 3 Matrik Rekapitulasi Habituasi NND PNS (BerAKHLAK).....	37
Tabel 4. 4 Capaian Penyelesaian Core Isu	38
Tabel 4. 5 Matrik Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi	41

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai	8
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Bappeda Kota Dumai	11
Gambar 3. 1 Diagram Fishbone	26
Gambar 2. 3 Foto Peserta.....	20

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Lampiran Mingguan Ke-IV September	47
Lampiran 2 Laporan Minggu Ke-IV September	51
Lampiran 3 Laporan Minggu Ke-IV September	57
Lampiran 4 Laporan Minggu Ke-I Oktober	62
Lampiran 5 Laporan Minggu Ke-II Oktober	67
Lampiran 6 Laporan Minggu Ke-III Oktober	72
Lampiran 7 Laporan Minggu Ke-IV Oktober	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu strategis dalam pembangunan nasional yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Pemerintah pusat menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan, melalui peningkatan ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan yang berkelanjutan. Kebijakan ini dijabarkan lebih lanjut oleh kementerian teknis, seperti Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian, melalui program-program lintas sektor yang mencakup pengawasan mutu pangan, diversifikasi konsumsi, penguatan cadangan pangan, dan edukasi gizi masyarakat.

Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan seluruh lapisan masyarakat, tetapi juga untuk memperkuat sistem pangan nasional yang tangguh terhadap krisis, perubahan iklim, dan dinamika global. Dalam konteks ini, ketahanan pangan dipandang sebagai fondasi penting bagi pembangunan sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, berbagai kementerian dan lembaga pusat seperti Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, dan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah merumuskan program-program lintas sektor yang terintegrasi, seperti pengembangan kawasan pangan terpadu (food estate), penguatan cadangan pangan pemerintah, diversifikasi konsumsi pangan lokal, serta pengawasan mutu dan keamanan pangan segar. Program-program ini menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi dan indikator kinerja yang relevan dengan kondisi lokal, termasuk di Kota Dumai yang memiliki karakteristik geografis, demografis, dan sosial ekonomi tersendiri.

Implementasi kebijakan ini di tingkat daerah dilakukan melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) OPD yang selaras dengan RPJMN. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan mampu menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam program yang sesuai dengan karakteristik lokal, termasuk dalam hal produksi pangan, distribusi, edukasi gizi, dan pengawasan mutu.

Pemerintah Kota Dumai memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan arah kebijakan nasional ke dalam program dan kegiatan yang sesuai dengan kondisi lokal. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) sebagai OPD teknis berperan penting dalam menjaga kualitas dan keamanan pangan, membina pelaku usaha pangan segar, serta mendorong konsumsi pangan yang beragam dan bergizi. Dalam konteks ini, evaluasi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) DKPP menjadi instrumen penting untuk menilai efektivitas pelaksanaan program, sekaligus memastikan bahwa intervensi yang dilakukan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dinas Ketahanan Pangan dan

Pertanian (DKPP) Kota Dumai juga memiliki peran strategis sebagai pelaksana teknis yang bertanggung jawab atas pengawasan keamanan pangan, pembinaan pelaku usaha pangan, serta edukasi masyarakat terkait konsumsi pangan sehat bergizi.

Berikut adalah beberapa isu strategis terkait ketahanan pangan di Kota Dumai:

Tabel 1. 1 Beberapa isu strategis terkait ketahanan pangan di Kota Dumai

No	Isu strategis
1	Terjadinya alih fungsi lahan pertanian pangan ke fungsi lain
2	Rendahnya produktifitas dan konsumsi pangan lokal
3	Meningkatnya prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan
4	Diversifikasi pangan masih terbatas
5	Masih rendahnya ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan
6	Rendahnya kuantitas ketersediaan pangan utama belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi masyarakat Kota Dumai
7	Ketersediaan dan cadangan pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang
8	Keamanan dan keanekaragaman konsumsi pangan melalui pengembangan pangan lokal masih kurang
9	Kekerigan dan bencana alam lainnya akibat perubahan iklim dapat mengganggu produksi pertanian dan ketersediaan pangan

Isu strategis ketahanan pangan di Kota Dumai mencerminkan tantangan multidimensi yang saling berkaitan. Alih fungsi lahan pertanian ke sektor lain mengancam basis produksi pangan lokal yang sudah terbatas. Produktivitas dan konsumsi pangan lokal masih rendah, sehingga masyarakat cenderung bergantung pada pasokan luar daerah. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan meningkat, menandakan adanya kesenjangan akses dan distribusi.

Diversifikasi pangan belum optimal, menyebabkan pola konsumsi kurang beragam dan bergizi. Ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan pangan masih lemah, terutama di daerah pesisir dan hinterland. Ketersediaan pangan utama belum mencukupi kebutuhan masyarakat secara kuantitatif. Cadangan pangan dan pengembangan pangan lokal belum mampu menopang ketahanan jangka panjang. Keamanan dan keanekaragaman konsumsi juga belum terjamin, memperbesar risiko gizi buruk. Terakhir, kekeringan dan bencana alam akibat perubahan iklim semakin memperparah ketidakpastian produksi dan distribusi pangan.

Untuk mengevaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait ketahanan pangan dalam Renstra DKPP Kota Dumai dan kesesuaiannya dengan arah kebijakan RPJMD Kota Dumai, guna memperkuat sistem perencanaan berbasis bukti dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan daerah. Sebagai Perencana Ahli Pertama di Bappeda Kota Dumai, saya memandang evaluasi Renstra DKPP bukan hanya sebagai kewajiban siklus perencanaan, tetapi sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan program benar-benar selaras dengan visi pembangunan daerah. Evaluasi ini disusun dengan pendekatan berbasis bukti, mengacu pada logika intervensi, dan mempertimbangkan tantangan lokal seperti keterbatasan data pangan, belum optimalnya koordinasi lintas OPD, serta perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam program ketahanan pangan. Dengan menelaah capaian indikator kinerja DKPP secara

sistematis, evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi gap antara target dan realisasi.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Tujuan umum penyusunan rancangan aktualisasi ini adalah mengimplementasikan nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran ASN dalam kerangka NKRI pada setiap pelaksanaan tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat. Memiliki akuntabilitas dalam setiap tugas, dengan semangat nasionalisme, menjunjung kode etik sebagai ASN dalam memberikan pelayanan masyarakat, memiliki komitmen mutu dalam tugas pokok dan fungsinya, serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada diri dalam melaksanakan tugas di satuan kerja.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi indikator ketahanan pangan yang tercantum dalam Renstra DKPP dan RPJMD Kota Dumai serta relevansinya terhadap isu strategis daerah.
- b. Mengevaluasi kesesuaian antara target dan realisasi program ketahanan pangan serta faktor-faktor yang mempengaruhi.
- c. Menyusun saran dan strategi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki indikator kinerja, menjalankan program ketahanan pangan dengan lebih baik, dan meningkatkan kerja sama antar dinas yang terlibat.

C. Manfaat Aktualisasi

Manfaat dari kegiatan aktualisasi dengan judul *“Evaluasi Capaian IKU DKPP Kota Dumai Sebagai Pendukung Program Nasional Terhadap Ketahanan Pangan”* sangat signifikan, baik bagi peserta Latsar maupun instansi tempat bekerja. Bagi peserta, kegiatan ini menjadi sarana untuk menerapkan langsung kompetensi sebagai Perencana Ahli Pertama, khususnya dalam menganalisis capaian indikator kinerja yang berdampak pada ketahanan pangan daerah. Proses evaluasi ini mendorong pemahaman yang lebih dalam terhadap hubungan antara perencanaan strategis dan pelaksanaan program nasional, sekaligus memperkuat kemampuan menyusun rekomendasi berbasis data.

Bagi instansi, manfaatnya terletak pada tersedianya analisis awal terhadap capaian IKU yang dapat digunakan sebagai bahan refleksi dan perbaikan dalam siklus perencanaan berikutnya. Evaluasi ini juga membantu mendorong budaya kerja yang lebih akuntabel dan berbasis bukti, serta memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam mendukung ketahanan pangan sebagai prioritas nasional. Secara keseluruhan, kegiatan ini mencerminkan aktualisasi nilai ASN BerAKHLAK, terutama akuntabilitas, kolaborasi, dan orientasi pelayanan, dalam bentuk kerja nyata yang berdampak langsung pada kualitas perencanaan daerah.

D. Ruang Lingkup

Penelitian ini tidak mencakup evaluasi capaian IKU seluruh program DKPP secara menyeluruh, melainkan berfokus pada aspek ketahanan pangan yang

memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, yang juga merupakan program strategis nasional. Evaluasi yang dilakukan terhadap Renstra DKPP dalam tahun berjalan (2025) hingga TW III. Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu yang mengikuti jadwal Habitiasi Latsar CPNS 2025.

BAB II

PROFIL INSTANSI DAN PESERTA

A. Profil Instansi

1. Sejarah Organisasi

Kota Dumai resmi menjadi kotamadya berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 pada tanggal 20 April 1999, setelah sebelumnya berstatus sebagai kota administratif di bawah Kabupaten Bengkalis. Seiring dengan pembentukan Pemerintah Kota Dumai, dibentuk pula lembaga perencanaan daerah yang awalnya bernama Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Dumai, dan berfungsi sebagai unit strategis dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan daerah.



Gambar 2. 1 Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Seiring perkembangan kelembagaan dan penyesuaian dengan regulasi nasional, Bappeko kemudian berubah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai. Kantor Bappeko saat itu berlokasi di Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur, yang hingga kini masih menjadi lokasi kantor Bappeda Kota Dumai.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (BAPPEDA) adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai masuk ke dalam klasifikasi tipe B, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang.

2. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi, misi dan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Kota Dumai mengikuti visi misi Kepala Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut:

a. Visi Kepala Daerah

Visi Kota Dumai yaitu mewujudkan Kepala Daerah Kota Dumai Sebagai
“Kota Industri yang Unggul, Sejahtera, dan Berkelanjutan Berlandaskan Budaya Melayu Tahun 2029.”

b. Misi Kepala Daerah

Misi Kepala Daerah Kota Dumai adalah sebagai berikut:

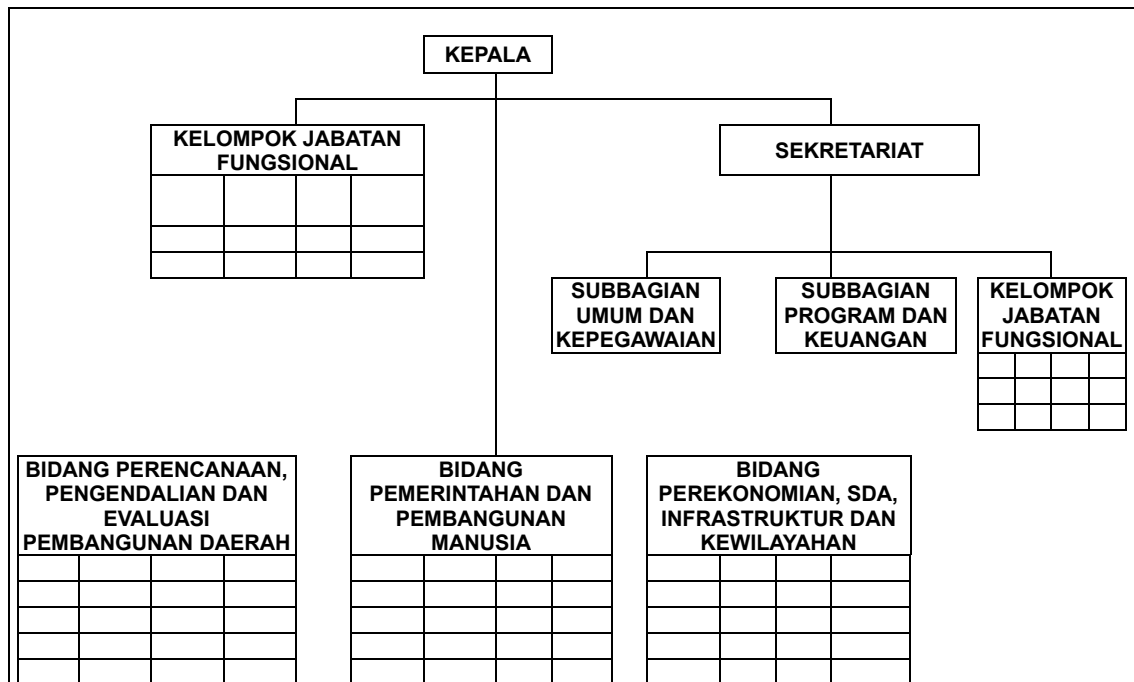
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas yang Berdaya Saing.
2. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Berkelanjutan.
3. Mewujudkan Perekonomian Kota yang Produktif.
4. Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Dumai dalam RPJMD Tahun 2025-2029 maka dukungan utama yang diberikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk berperan menunjang Misi ke-4 Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel, dengan Tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Berkualitas.

3. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai membawahi 1 sekretariat dan 3 bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

Adapun susunan organisasi Bappeda Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 2.1. dibawah ini.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Bappeda Kota Dumai

Bappeda melaksanakan tugas membantu Wali Kota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang Perencanaan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) atau perencanaan tahunan.
- b. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknoratik, politik, bottom up top down dan partisipatif.

- c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional, perencanaan provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja lainnya.
- d. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan kinerja perangkat daerah.
- e. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, bimbingan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pembangunan daerah.
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan.
- h. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi rencana tata ruang wilayah dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.
- i. Penyusunan rencana secara makro kawasan strategis, kawasan khusus, kawasan pertumbuhan, kawasan kumuh dan sejenisnya dalam perencanaan pembangunan daerah.
- j. Perumusan penelitian, riset, kajian dan kerjasama pengembangan perencanaan pembangunan daerah.
- k. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyebaran informasi pembangunan daerah.
- l. Penyusunan profil, penyebaran informasi dan publikasi perencanaan pembangunan daerah.

- m. Penyusunan Rencana induk (master plan), rencana aksi serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya.
- n. Penyusunan perencanaan, pelaksanaa, monitoring dan evaluasi program/kegiatan dan penganggaran badan.
- o. Pelaksanaan, bimbingan, pengendalian monitoring dan evaluasi kesekretariatan meliputi urusan tata usaha, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan aset.
- p. Penyiapan fungsi lain yang diberikan walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai membawahi 1 sekretariat dan 3 bidang. Berikut adalah penjabaran Sub Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayah, dimana merupakan unit kerja penulis:

1. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan melaksanakan tugas menyiapkan pengoodinasian perumusan perencanaan pembangunan daerah, meliputi urusan pangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, perikanan, pertanian, perdagangan, perindustrian, perkerjaan umum, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertanahan dan penataan ruang, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan), lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, dan

unsur kewilayahan, serta unsur pendukung urusan pemerintahan Sekretariat DPRD.

Uraian tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

- a. Merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- b. Menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah
- c. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD)
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD,
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah,
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional,
- j. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan,

- k. Mengoordinasikan penyusunan rencana induk dan rencana aksi terkait perencanaan pembangunan daerah,
- l. Menyiapkan penyusunan bahan dan pelaksanaan monitoring serta evaluasi program/kegiatan dalam perencanaan pembangunan,
- m. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala yang dikoordinasikan oleh Sekretaris.

Bidang perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD),
- b. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah,
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)
- d. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, dan RKPD,
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD,

- f. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah,
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di provinsi dan kabupaten/kota
- h. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional,
- i. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah,
- j. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah,
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka sinkronisasi rencana implementasi dokumen rencana umum tata ruang, kawasan strategis dan/atau rencana induk sektoral skala kota,
- l. Melaksanakan penyusunan dokumen rencana sektoral skala kota di lingkup Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan,
- m. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan pembangunan daerah,
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian serta pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah dalam lingkup koordinasi Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, dan
- o. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai fungsinya.

4. Nilai-Nilai Organisasi

a. Integritas

Integritas merupakan fondasi utama dalam setiap proses perencanaan dan evaluasi pembangunan di Bappeda Kota Dumai. Nilai ini tercermin dalam komitmen untuk bekerja secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab terhadap publik. Dalam praktiknya, integritas berarti menyusun dokumen perencanaan yang bebas dari manipulasi data, menyampaikan hasil evaluasi secara objektif, serta menjaga kepercayaan antar instansi dan masyarakat. Pegawai Bappeda diharapkan menjadi teladan dalam menjunjung etika kerja dan menolak segala bentuk penyimpangan.

b. Profesionalisme

Profesionalisme di Bappeda bukan hanya soal kompetensi teknis, tetapi juga tentang sikap kerja yang konsisten, objektif, dan berorientasi pada kualitas. Setiap perencana dituntut untuk memahami kerangka kerja pembangunan, mampu menyusun dokumen yang sistematis, dan memberikan rekomendasi berbasis data. Dalam menghadapi tantangan seperti keterbatasan waktu atau koordinasi lintas sektor, profesionalisme menjadi penentu keberhasilan pelaksanaan tugas secara efisien dan bermartabat.

c. Kolaborasi

Sebagai lembaga yang menjadi simpul koordinasi pembangunan daerah, Bappeda menjadikan kolaborasi sebagai nilai strategis. Perencanaan yang efektif tidak dapat dilakukan secara silo, melainkan harus melibatkan OPD

lain, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Kolaborasi berarti membuka ruang dialog, menyatukan perspektif, dan membangun sinergi untuk mencapai tujuan pembangunan bersama. Dalam konteks Dumai, hal ini sangat penting untuk memastikan program seperti ketahanan pangan berjalan lintas sektor dan berkelanjutan.

d. Inovasi

Bappeda mendorong inovasi sebagai cara untuk menjawab tantangan pembangunan yang terus berubah. Inovasi tidak selalu berarti teknologi tinggi, tetapi juga mencakup pendekatan baru dalam menyusun indikator, metode evaluasi, atau cara menyampaikan hasil kepada publik. Pegawai didorong untuk berpikir kreatif, mencoba format yang lebih komunikatif, dan mengembangkan sistem yang bisa direplikasi oleh generasi berikutnya. Inovasi menjadi kunci agar perencanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berdampak nyata.

e. Berorientasi Hasil

Setiap program dan kegiatan yang dirancang oleh Bappeda harus memiliki tujuan yang jelas dan indikator keberhasilan yang terukur. Nilai ini menekankan pentingnya fokus pada dampak, bukan sekadar proses. Dalam evaluasi IKU misalnya, orientasi hasil berarti menilai apakah intervensi benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya memenuhi target administratif. Dengan pendekatan ini, Bappeda dapat memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai arah dan memberikan manfaat konkret.

f. Responsif dan Adaptif

Lingkungan kebijakan dan kebutuhan masyarakat terus berubah, sehingga Bappeda harus mampu merespons dengan cepat dan menyesuaikan strategi. Responsif berarti peka terhadap isu-isu aktual, seperti krisis pangan atau perubahan iklim, sementara adaptif berarti mampu menyesuaikan metode kerja, format laporan, dan pendekatan komunikasi sesuai konteks. Nilai ini penting agar Bappeda tetap relevan dan mampu menjadi penggerak perubahan yang dinamis.

Sebagai bagian dari ASN, pegawai Bappeda menginternalisasi nilai BerAKHLAK: Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai ini menjadi panduan perilaku sehari-hari, baik dalam interaksi internal maupun eksternal. Dalam konteks perencanaan, BerAKHLAK berarti menyusun program yang berpihak pada masyarakat, menyampaikan data secara jujur, bekerja sama lintas sektor, dan terus belajar untuk meningkatkan kapasitas diri. Nilai ini memperkuat identitas ASN sebagai pelayan publik yang berintegritas dan berdampak.

B. Profil Peserta



Gambar 2. 3 Foto Peserta

Penulis bernama lengkap Susi Munikasari, merupakan salah satu peserta Pelatihan Dasar Calon Aparatur Sipil Negara (Latsar CPNS) Tahun 2025, Angkatan 21 kelompok 2, yang diadakan oleh PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi. Penulis lahir di Bagan Besar, Kota Dumai, 31 Mei 1991. Pernah berkuliah di Universitas Riau, jurusan Ilmu Ekonomi. Saat ini penulis berkerja di Instansi Bappeda Kota Dumai, dalam Jabatan perencanaan Ahli Pertama, Subbidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan.

C. Tugas Jabatan dan Ruang Lingkup Kegiatan

Menurut Peraturan MENPANRB Nomor 20 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional, tugas Jabatan Fungsional Perencana, kedudukan dan tanggung jawab perencana diantaranya:

1. Perencana berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional perencanaan pembangunan pada Instansi Pemerintah.

2. Perencana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Perencana.
3. Dalam hal unit Organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional, Perencana dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional lain yang memimpin Unit Organisasi.

Tugas Jabatan Fungsional Perencana adalah melaksanakan teknis kebijakan perencanaan. Tugas tersebut dilaksanakan berdasarkan ruang lingkup kegiatan meliputi identifikasi masalah/isu strategis rencana pembangunan, penyusunan kebijakan rencana pembangunan, penyusunan adopsi dan legitimasi rencana pembangunan, pelaksanaan rencanan pembangunan, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Ruang lingkup kegiatan untuk setiap jenjang jabatan, meliputi:

- a. Perencana Ahli Pertama menyiapkan data dan dokumen pendukung lain untuk penyusunan dokumen dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan.
- b. Perencana Ahli Madya menyusun rencana pelaksanaan kebijakan, rencana, dan program, kegiatan sektoral, lintas sektor, dan regional serta anggaran pembangunan strategis jangka pendek.
- c. Perencana Ahli Madya menyusun, mengendalikan dan memantau rencana pelaksanaan kebijakanm rencana, dan program serta menyusun desain

instrumen dan arahan pelaksanaan evaluasi rencana pembangunan jangka menengah; dan

- d. Perencana Ahli Utama menyusun perencanaan kebijakan strategis/program jangka panjang, perencanaan kebijakan/program strategis makro, rencana pembangunan regional, mendesain program kawasan, serta melakukan telaahan lingkup makro/lintas sektoral/kawasan dalam berbagai forum musyawarah.

Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud sebelumnya, Perencana diberikan tugas lainnya. Yang mana hal tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ekspektasi pimpinan pada instansi pengguna dalam rangka pencapaian target organisasi. Ekspektasi ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal melaksanakan tugas, ruang lingkup kegiatan, dan tugas lainnya Perencana membutuhkan keahlian tertentu, Perencana harus memiliki sertifikat keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

RINGKASAN RANCANGAN AKTUALISASI

A. Deskripsi Core Isu

Identifikasi isu dalam rancangan aktualisasi merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan nyata di lingkungan kerja. Melalui identifikasi isu, kita dapat mengenali kesenjangan antara kondisi ideal dan realita yang terjadi. Berikut ini isu yang terpilih dalam pelaksanaan aktualisasi, yaitu **“Perlunya dilakukan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai sebagai pendukung prioritas Nasional terkait ketahanan Pangan”**.

Evaluasi IKU menjadi penting untuk memastikan sinkronisasi antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah. Berikut penjelasan ringkas dari isu ini:

a. Kondisi saat ini

Berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (tahun 2025-2029), kondisi ketahanan pangan di Kota Dumai saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari alih fungsi lahan pertanian, rendahnya produktivitas dan konsumsi pangan lokal, hingga meningkatnya ketidakcukupan konsumsi. Diversifikasi pangan masih terbatas, dan ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan belum optimal. Ketersediaan dan

cadangan pangan utama belum mencukupi, sementara keamanan dan keanekaragaman konsumsi juga masih kurang. Dampak perubahan iklim seperti kekeringan turut memperburuk produksi dan distribusi pangan.

b. Dampak dan Para Pihak Yang Terdampak Jika Isu Tidak diselesaikan

Jika tantangan ketahanan pangan di Kota Dumai tidak segera diatasi, dampaknya akan dirasakan oleh rumah tangga miskin dan rentan yang kesulitan memenuhi kebutuhan gizi, petani lokal yang kehilangan lahan dan pendapatan, serta pemerintah daerah yang menghadapi penurunan capaian kinerja. Anak-anak dan lansia berisiko mengalami gizi buruk, sementara ketergantungan pada pasokan luar daerah memperbesar potensi inflasi dan kelangkaan pangan. Dampak perubahan iklim juga mengancam produksi dan distribusi, sehingga seluruh lapisan masyarakat terpapar risiko sosial, ekonomi, dan kesehatan yang lebih luas. Sehingga target dan sasaran program Nasional terkait ketahanan pangan akan sulit di capai.

c. Keterkaitan isu dengan Subtansi Mata Pelatihan pada Agenda III

Untuk menjawab tantangan terkait isu ketahanan pangan dituntut perencanaan strategis yang erat kaitannya dengan nilai manajemen ASN. Dalam konteks Smart ASN, solusi dari isu ini harus di dorong oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

B. Analisis Core Isu

Dalam proses aktualisasi, penetapan core issue menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa isu yang diangkat benar-benar mencerminkan permasalahan utama yang berdampak terhadap pencapaian kinerja. Core

issue bukan sekadar permasalahan permukaan, melainkan akar persoalan yang memerlukan perhatian dan penyelesaian strategis.

Untuk mengidentifikasi core issue secara objektif dan sistematis, digunakan pendekatan analisis sebab-akibat (fishbone diagram). Pendekatan ini dipilih karena mampu memetakan berbagai faktor penyebab dari suatu permasalahan secara menyeluruh, baik dari aspek kebijakan, prosedur, sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga lingkungan kerja. Dengan metode ini, setiap cabang penyebab dianalisis untuk menemukan hubungan sebab-akibat yang paling dominan dan berkontribusi besar terhadap munculnya isu.

Analisis ini menjadi semakin relevan karena dalam pelaksanaan program, sering kali ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi, baik dari sisi fisik maupun anggaran. Ketimpangan ini menjadi indikasi adanya hambatan struktural atau prosedural yang perlu ditelusuri lebih dalam melalui analisis fishbone.

Dengan demikian, pendekatan fishbone tidak hanya membantu mengidentifikasi core issue secara tajam, tetapi juga memberikan dasar yang kuat untuk merumuskan solusi yang tepat sasaran. Hasil analisis ini akan menjadi pijakan dalam menyusun rekomendasi perbaikan dan integrasi ke dalam perencanaan tahun berikutnya, agar program berjalan lebih efektif, efisien, dan berdampak nyata.



Gambar 3. 1 Diagram Fishbone

D. Gagasan kreatif Penyelesaian Core Isu

Dari analisis dengan metode fishbone, maka gagasan kreatif yang akan dilakukan untuk menyelesaikan core isu tersebut adalah dengan melakukan **“evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai sebagai pendukung prioritas Nasional terkait ketahanan Pangan”**. Karena evaluasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa program ketahanan pangan yang dijalankan perangkat daerah pengampu program nasional terkait ketahanan pangan sudah dijalankan secara optimal dan selaras dengan, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai. Evaluasi ini menjadi penting karena mengidentifikasi gap antara target dan realisasi IKU. Sehingga perangkat daerah tahu dimana letak kelemahan implementasi program. Dalam kegiatan ini dilakukan dengan beberapa kegiatan beserta tahapan-tahapan yang diantara sebagai berikut:

1. Melaksanakan konsultasi dan meminta persetujuan serta bimbingan mentor terkait kegiatan habituasi yang akan dilaksanakan.

2. Melakukan studi dokumen terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) dan LKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai.
3. Melakukan identifikasi data dan sumber informasi yang akan digunakan.
4. Melakukan analisis gap dan potensi permasalahan pelaksanaan IKU.
5. Melakukan rapat koordinasi bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait penyampaian hasil analisis terhadap data capaian IKU.
6. Melakukan penyampaian hasil evaluasi ke atasan langsung.
7. Membuat laporan aktualisasi kegiatan.

BAB IV

CAPAIAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi

Tabel 4. 1 Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan				
		Septe mber	Oktober			
			Minggu ke-			
			IV	I	II	III
1	Melakukan konsultasi, dan meminta persetujuan serta bimbingan mentor terkait kegiatan habituasi yang akan dilaksanakan (22-26 September 2025)					
2	Melakukan studi Dokumen terkait IKU dan LKIP DKPP (22-26 September 2025)					
3	Melakukan Identifikasi data dan sumber informasi yang akan digunakan (26-30 September 2025)					
4	Melakukan Analisis GAP dan potensi permasalahan pelaksanaan IKU (22-26 September 2025) (1-7 Oktober 2025)					
5	Melakukan Rapat Koordinasi bersama DKPP terkait penyampaian hasil analisis terhadap data capaian IKU (8-14 Oktober 2025)					
6	Melakukan Penyampaian hasil evaluasi ke atasan langsung (15-21 Oktober 2025)					
7	Membuat Laporan Aktualisai kegiatan (22-31 Oktober 2025)					

B. Matrik Pelaksanaan Aktualisasi

Unit Kerja	:	Perencana Ahli Pertama, Subbid Perekonomia Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai
Identifikasi Isu	:	1. Perlunya dilakukan evaluasi terhadap capaian IKU terkait ketahanan pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai 2. Perlunya sosialisasi peran masyarakat dalam usulan pembangunan di Kota Dumai 3. Perlunya koordinasi antar OPD mitra Bappeda dalam proses perencanaan, di Bappeda Kota Dumai
Isu yang Diangkat	:	Perlunya dilakukan evaluasi terhadap capaian IKU terkait ketahanan pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai
Gagasan Pemecahan Isu	:	Melakukan evaluasi terhadap capaian Iku terkait ketahanan pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai.

Tabel 4. 2 Matrik Pelaksanaan Aktualisasi

No	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Output/Hasil Kegiatan	Keterkaitan Subtansi BerAKHLAK	Kontribusi Terhadap Visi/Misi Organisasi	Penguatan Nilai BerAKHLAK di Organisasi
1	Melakukan konsultasi, dan meminta persetujuan serta	1. Membuat draf surat persetujuan kegiatan habituasi dengan judul aktualisasi yang telah diseminarkan	Tersedianya draf persetujuan kegiatan habituasi yang telah ditanda tangani oleh mentor	Akuntabel , saya mengupayakan bentuk tanggung jawab administratif dalam memastikan bahwa rencana aktualisasi telah	Kegiatan konsultasi dan bimbingan dengan mentor sebelum pelaksanaan	Kegiatan konsultasi dan bimbingan dengan mentor sebelum

	bimbingan mentor terkait kegiatan habituasi yang akan dilaksanakan			diketahui dan disetujui oleh mentor. Kompeten, saya membuat draf persetujuan kegiatan dengan kaidah tata naskah dinas Harmonis, saya berupaya membangun hubungan kerja yang saling menghargai antara peserta dan mentor.	habituasi berkontribusi langsung terhadap misi Pemerintah Kota Dumai, khususnya dalam meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing serta mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui perencanaan kegiatan yang terarah, terstandar, dan sesuai dengan visi pembangunan daerah.	pelaksanaan habituasi mencerminkan penerapan nilai-nilai BerAKHLAK, seperti akuntabilitas, kompetensi, adaptif, dan kolaboratif. Hal ini mendukung perencanaan kegiatan yang lebih terarah, berkualitas, serta sejalan dengan upaya membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan SDM yang unggul sesuai visi dan misi Pemerintah Kota Dumai.
	2. Menemui dan melakukan konsultasi dengan mentor	Tersedianya dokumentasi atas kegiatan konsultasi	Akuntabel, saya berupaya menyampaikan rencana kegiatan secara jelas dan bertanggungjawab Harmonis, Saya melakukan komunikasi langsung yang terbuka, sopan dan saling menghargai Kompeten, Saya berupaya menjelaskan kegiatan dan menerima masukan untuk penyempurnaan			
	3. Meminta tanda tangan terhadap draf surat persetujuan yang telah dibuat	Tersedianya catatan hasil saran dan masukan dari mentor	Akuntabel, Saya berupaya nunjukkan tanggung jawab dalam mencatat dan menindaklanjuti arahan pembimbing. Adaptif, Saya terbuka terhadap perubahan dan siap menyempurnakan rencana berdasarkan masukan yang diterima. Harmonis, Saya melalui interaksi yang saling			

				menghargai menyampaikan rencana kegiatan.		
2	Melakukan studi Dokumen IKU, Renstra dan LKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1. Mengidentifikasi dokumen yang relevan (Renstra dan LKIP) 2. Membaca dan mencatat indikator yang berkaitan dengan ketahanan pangan 3. Menyusun ringkasan pemahaman dalam bentuk paragraf penjelasan	Tersedianya dokumen Renstra dan LKIP yang relevan dan digunakan terkait dengan ketahanan pangan Tersedianya catatan daftar indikator yang berkaitan dengan ketahanan pangan Tersedianya paragraf ringkasan terkait indikator yang digunakan Pada renstra.	Akuntabel, Saya menunjukkan tanggung jawab terhadap tugas ini Kompeten, Saya membaca terkait dokumen untuk mencerminkan upaya peningkatan kapasitas diri. Loyal, Saya menunjukkan komitmen terhadap pencapaian tujuan kegiatan Akuntabel, Saya mencatat indikator secara sistematis dan berdasar sumber resmi Kompeten, Saya berupaya memahami data, indikator kinerja, dan arah kebijakan yang relevan Kolaboratif, Saya mendukung kerja tim dan sinergitas Adaptif, Saya menunjukkan kesiapan menghadapi perubahan Kompeten, Saya berupaya memahami isu strategis dan indikatornya Akuntabel, Saya membuat ringkasan berdasarkan dokumen resmi Kolaboratif, Saya berupaya meningkatkan sinergitas dan keselarasan antar unir kerja	Studi terhadap dokumen IKU, Renstra, dan LKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian berkontribusi pada misi keempat Pemerintah Kota Dumai dengan memperkuat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan melalui perencanaan berbasis data dan evaluasi kinerja yang terarah.	Kegiatan studi dokumen IKU, Renstra, dan LKIP memperkuat penerapan nilai BerAKHLAK melalui akuntabilitas dalam memahami kinerja, kompetensi dalam analisis perencanaan, serta kolaborasi lintas unit. Hal ini mendukung tata kelola yang adaptif dan berorientasi pelayanan dalam mencapai tujuan organisasi.

				Adaptif , Saya menunjukkan kesiapan menghadapi dinamika isu pembangunan		
3	Melakukan Identifikasi data capaian dan sumber informasi	1. Menentukan sumber data	Tersedianya daftar sumber data utama	Kompeten, Saya berupaya meningkatkan kapasitas sebagai ASN yang profesional dan berbasis bukti Akuntabel, Saya menunjukkan tanggungjawab terhadap keabsahan informasi Kolaboratif, Saya meningkatkan kemampuan membangun komunikasi yang baik dan saling menghargai. Loyal, Saya menunjukkan komitmen untuk mendukung tujuan kelembagaan.	Kegiatan identifikasi data capaian dan sumber informasi mendukung misi keempat Pemerintah Kota Dumai dengan memperkuat efektivitas dan akuntabilitas tata kelola melalui perencanaan berbasis data yang akurat dan evaluasi kinerja yang terukur.	Kegiatan identifikasi data capaian dan sumber informasi memperkuat nilai BerAKHLAK melalui akuntabilitas dalam pengelolaan data, kompetensi dalam analisis, serta kolaborasi dan adaptivitas dalam mendukung evaluasi kinerja yang transparan dan berbasis bukti.
		2. Mengumpulkan dan data mengklasifikasi capaian IKU)	Tersedianya tabel klasifikasi capaian IKU	Akuntabel, Saya menunjukkan tanggung jawab menyajikan data yang dapat dipertanggung jawabkan Kompeten, Saya belajar meningkatkan pemahaman terhadap IKU Kolaboratif, Saya meminta arahan dan berdiskusi dengan atasan Adaptif, Saya berusaha menyusun data sesuai data yang terbaru Harmonis, Saya menunjukkan sikap		

				menghargai terhadap seluruh pihak yang terlibat		
		3. Membuat tabel realisasi capaian terhadap target IKU	Tersedianya tabel capaian IKU terstruktur	Akuntabel , Saya mencatat ketidaksesuaian data dan kekosongan sebagai bentuk tanggung jawab Kompeten , Saya menyajikan data yang relevan dengan tugas perencanaan Berorientasi Pelayanan , Saya memastikan evaluasi berdasarkan pada pelayanan publik		
4	Melakukan Analisis Gap dan potensi pelaksanaan IKU	1. Menyusun format analisis gap (target vs capaian)	Tersedianya tabel analisis GAP IKU	Kompeten , Saya menyusun format analisis gap secara transparan. Adaptif , Saya menyesuaikan format analisis sesuai kebutuhan evaluasi Harmonis , Saya menyajikan data secara objektif Loyal , Saya berusaha memastikan bahwa analisis gap mendukung ketahanan pangan Berorientasi pelayanan , Saya menggunakan hasil analisis gap untuk menyusun rekomendasi	Analisis gap dan potensi pelaksanaan IKU mendukung misi keempat Pemerintah Kota Dumai dengan mengidentifikasi kesenjangan kinerja dan merumuskan strategi perbaikan, sehingga memperkuat efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.	Kegiatan analisis gap dan potensi pelaksanaan IKU memperkuat nilai BerAKHLAK melalui akuntabilitas dalam menilai kinerja, kompetensi dalam menyusun strategi, serta kolaborasi dan adaptivitas dalam mencapai target organisasi secara efektif.
		2. Mengisi format dengan data dan mengidentifikasi kendala teknis/substansi	Tersedianya daftar kendala teknis/substansi dalam pencapaian target	Kompeten , Saya mengolah data capaian IKU dengan ketelitian Adaptif , Saya menyesuaikan format dan		

				pendekatan analisis sesuai dinamika kebijakan Kolaboratif , Saya berkoordinasi dengan OPD terkait mengklarifikasi data Harmonis , Saya menyampaikan kendala secara objektif tanpa menyalahkan siapapun		
		3. Menyusun rekomendasi tindak lanjut yang diberikan terhadap permasalahan	Tersedianya daftar rekomendasi	Kompeten , Saya berusaha mengidentifikasi tantangan dan peluang dengan strategi yang tepat Adaptif , Saya berusaha menyusun poin-poin perbaikan yang responsif Berorientasi Pelayanan , Saya berupaya memastikan tujuannya adalah meningkatkan kualitas program		
5	Melakukan Rapat dan diskusi bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait penyampaian hasil analisis terhadap data capaian iku.	1. Mempersiapkan undangan rapat koordinasi serta pendukung pelaksanaan rapat (monitor, dan perlengkapann lainnya)	Tersedianya undangan rapat dan diskusi serta pendukung pelaksanaan rapat (monitor dan perlengkapan lainnya)	Akuntabel , Saya menunjukkan tanggungjawab dalam menyampaikan hasil analisis yang dapat dipertanggungjawabkan Kompeten , Saya berupaya mencerminkan penguasaan terhadap substansi perencanaan dan evaluasi Loyal , Saya menunjukkan komitmen terhadap kemajuan instansi	Rapat dan diskusi bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait hasil analisis data capaian IKU mendukung misi keempat Pemerintah Kota Dumai dengan memperkuat efektivitas, efisiensi, dan	Kegiatan rapat dan diskusi memperkuat nilai BerAKHLAK melalui akuntabilitas dalam penyampaian data, kompetensi dalam analisis, serta kolaborasi dan adaptivitas dalam

		2. Menyampaikan hasil analisis terhadap capaian iku kepada dkpp	Terselenggaranya rapat dan diskusi bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Akuntabel , Saya menyampaikan terkait capaian iku berdasarkan data Kompeten , saya menyusun hasil berdasarkan hasil analisi	akuntabilitas melalui komunikasi kinerja yang transparan dan sinergi antar pihak.	merumuskan strategi peningkatan kinerja bersama.
		3. Membuat ringkasan terkait hasil rapat dan diskusi	Tersedianya ringkasan terkait hasil rapat dan diskusi	Akuntabel , saya memastikan setiap rekomendasi dapat dipertanggungjawabkan Kompeten , Saya berupaya memahami substansi program		
6	Melakukan Penyampaian hasil evaluasi ke atasan langsung	1. Menyusun ringkasan hasil evaluasi dalam format yang komunikatif	Tersedianya Bukti penyampaian hasil evaluasi (berita acara, tanggapan atasan, atau dokumen komunikasi)	Akuntabel , Saya berupaya menunjukkan tanggungjawab profesional dengan menyampaikan hasil evaluasi secara terbuka Harmonis , Saya menjaga etika komunikasi, dan berusaha mencerminkan sikap saling menghargai Berorientasi Pelayanan , Saya menunjukkan semangat melayani instansi dengan memberikan rekomendasi yang aplikatif	Penyampaian hasil evaluasi kepada atasan langsung mendukung misi keempat Pemerintah Kota Dumai dengan menyediakan informasi kinerja yang akurat untuk pengambilan keputusan strategis, sehingga memperkuat efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan.	Penyampaian hasil evaluasi kepada atasan memperkuat nilai BerAKHLAK melalui akuntabilitas dalam pelaporan, kompetensi dalam analisis, loyalitas mendukung pimpinan, serta kolaborasi untuk perbaikan kinerja
		2. Menyampaikan hasil secara langsung atau melalui laporan tertulis	Tersedianya Dokumentasi terkait penyampaian hasil evaluasi kepada atasan	Akuntabel , saya menyampaikan hasil evaluasi secara jujur dan transparan Kompeten , saya menyusun laporan dengan struktur yang jelas		

		3. Menerima masukan dari atasan dan menyesuaikan perbaikan jika diperlukan	Tersedianya catatan perbaikan atasan jika diperlukan	Loyal , saya menerima arahan dan masukan dari atasan dengan sikap terbuka Adaptif , Saya menyesuaikan perbaikan dengan masukan yang konstruktif		
7	Membuat Laporan Aktualisasi kegiatan	1. Mengumpulkan seluruh dokumen pendukung kegiatan habituasi	Tersedianya dokumen pendukung kegiatan aktualisasi dan dokumentasi	Akuntabel , Saya berusaha transparan, jujur, dan serius dalam mendokumentasikan hasil Kompeten , Saya berusaha menguasai substansi evaluasi dan kemampuan komunikasi tertulis Berorientasi Pelayanan , Saya berusaha menyusun laporan dengan semangat melayani, agar hasil aktualisasi bisa menjadi referensi.	Penyusunan laporan aktualisasi kegiatan mendukung misi keempat Pemerintah Kota Dumai dengan memperkuat akuntabilitas dan efektivitas melalui dokumentasi kinerja yang selaras dengan visi dan arah pembangunan daerah.	Penyusunan laporan aktualisasi kegiatan memperkuat nilai BerAKHLAK melalui akuntabilitas dalam pelaporan, kompetensi dalam penyusunan, loyalitas terhadap visi organisasi, serta kolaborasi dalam pengumpulan informasi.
		2. Menulis laporan aktualisasi	Tersedianya laporan aktualisasi	Akuntabel , saya menyusun laporan yang jujur dan transparan Kompeten , saya akan menyajikan data dan rekomendasi secara sistematis		
		3. Melakukan review laporan agar sesuai dengan kaidah bahasa, format dan substansi yang telah ditetapkan.	Tersedianya laporan yang telah direvisi	Kompeten , saya akan memastikan berupaya agar laporan tersusun dengan bahasa yang tepat Akuntabel , Saya akan melakukan review secara teliti dan bertanggungjawab		

C. Matrik Rekapitulasi Realisasi Habituasi NND PNS (BerAKHLAK)

Tabel 4. 3 Matrik Rekapitulasi Habituasi NND PNS (BerAKHLAK)

No	Mata Pelatihan	Kegiatan														Jumlah Aktualisasi per MP	
		Ke-1		Ke-2		Ke-3		Ke-4		Ke-5		Ke-6		Ke-7			
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	Berorientasi Pelayanan	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	1	1	1	1	5	5
2	Akuntabel	3	3	3	3	3	3	0	0	3	3	2	2	3	3	17	17
3	Harmonis	3	3	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	6	6
4	Kompeten	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	3	3	18	18
5	Loyal	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	2	2	0	0	5	5
6	Adaptif	1	1	2	2	1	1	3	3	0	0	1	1	0	0	8	8
7	Kolaboratif	0	0	2	2	2	2	1	1	0	0	0	0	0	0	5	5
Jumlah MP yang Diaktualisasikan per Kegiatan		9	9	11	11	11	11	11	11	7	7	8	8	7	7	64	64

D. Capaian Penyelesaian Core Isu

Tabel 4. 4 Capaian Penyelesaian Core Isu

Kondisi Core Isu																																																									
Sebelum Aktualisasi	Sesudah Aktualisasi																																																								
Berdasarkan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (tahun 2025-2029), kondisi ketahanan pangan di Kota Dumai saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari alih fungsi lahan pertanian, rendahnya produktivitas dan konsumsi pangan lokal, hingga meningkatnya ketidakcukupan konsumsi. Diversifikasi pangan masih terbatas, dan ketahanan pangan rumah tangga di wilayah rawan belum optimal. Ketersediaan dan cadangan pangan utama belum mencukupi, sementara keamanan dan keanekaragaman konsumsi juga masih kurang. Dampak perubahan iklim seperti kekeringan turut memperburuk produksi dan distribusi pangan.	Setelah pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan beserta tahapannya, yang menilai tingkat pencapaian kinerja dalam mendukung program nasional ketahanan pangan, mengidentifikasi efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi capaian tersebut. Evaluasi ini juga dimaksudkan untuk mendorong akuntabilitas dan transparansi kinerja, memberikan dasar bagi perbaikan kebijakan. Maka dihasilkan laporan hasil evaluasi yang berisi ringkasan dan gambaran awal terkait capaian Indikator dan rekomendasi yang diberikan terkait percepatan pencapaian target IKU di Triwulan IV. Adapun capaian IKU di Triwulan III adalah sebagai berikut: <table><tr><th rowspan="3">Indikator</th><th rowspan="3">Target Tahun 2025</th><th colspan="8">CAPAIAN TARGET DAN REALISASI IKU DALAM TRIWULAN</th></tr><tr><th colspan="2">TW I</th><th colspan="2">TW II</th><th colspan="2">TW III</th><th colspan="2">TW IV</th></tr><tr><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Target</th><th>Realisasi</th><th>Target</th><th>Realisasi</th></tr><tr><td>Skor pola pangan harapan</td><td>88,78</td><td>22,20</td><td>22,20</td><td>44,39</td><td>44,39</td><td>66,59</td><td>83,6</td><td>88,78</td><td>On Progress</td></tr><tr><td>Persentase daerah rawan pangan</td><td>3,03</td><td>0,76</td><td>0,76</td><td>1,52</td><td>1,52</td><td>2,27</td><td>1,87</td><td>3,03</td><td>On Progress</td></tr><tr><td>Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu</td><td>100</td><td>25</td><td>25</td><td>50</td><td>50</td><td>75</td><td>50</td><td>100</td><td>On Progress</td></tr></table> Dengan melihat evaluasi capaian IKU hingga TW-III, dan pencapaian target program yang berkaitan, maka dihasilkan laporan evaluasi yang berisi rekomendasi untuk TW-IV, sebagai berikut: https://drive.google.com/file/d/1vjbJEDZ8V_bzwIT5nKpuF93kvkYpPpTV/view?usp=sharing	Indikator	Target Tahun 2025	CAPAIAN TARGET DAN REALISASI IKU DALAM TRIWULAN								TW I		TW II		TW III		TW IV		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Skor pola pangan harapan	88,78	22,20	22,20	44,39	44,39	66,59	83,6	88,78	On Progress	Persentase daerah rawan pangan	3,03	0,76	0,76	1,52	1,52	2,27	1,87	3,03	On Progress	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu	100	25	25	50	50	75	50	100	On Progress
Indikator	Target Tahun 2025			CAPAIAN TARGET DAN REALISASI IKU DALAM TRIWULAN																																																					
				TW I		TW II		TW III		TW IV																																															
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi																																																
Skor pola pangan harapan	88,78	22,20	22,20	44,39	44,39	66,59	83,6	88,78	On Progress																																																
Persentase daerah rawan pangan	3,03	0,76	0,76	1,52	1,52	2,27	1,87	3,03	On Progress																																																
Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu	100	25	25	50	50	75	50	100	On Progress																																																

E. Manfaat terselesaikannya Core Isu

berisi penjelasan tentang manfaat dari terpecahkannya core isu tersebut bagi:

1) Individu

Melalui kegiatan aktualisasi ini, saya semakin memahami bahwa peran seorang perencana tidak hanya terbatas pada penyusunan dokumen perencanaan, tetapi juga memiliki kontribusi penting dalam mengawal pelaksanaan program dan kegiatan di setiap OPD terkait agar berjalan sesuai rencana, target dan arah kebijakan pembangunan daerah, melalui monitoring dan evaluasi yang rutin dilakukan per-triwulan. Dengan evaluasi capaian iku yang dilakukan di triwulan III, menjadi langkah awal yang memberikan gambaran terkait ketercapaian maupun kendala terkait program dan kegiatan, untuk kemudian dapat disusun rekomendasi peningkatan ketercapaian pada triwulan ke IV.

2) Instansi

Melalui kegiatan aktualisasi ini, Bappeda Kota Dumai memperoleh manfaat strategis dalam memperkuat peran sebagai koordinator pembangunan daerah.

Evaluasi capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai di TW-III memberikan gambaran awal yang penting bagi Bappeda untuk menilai efektivitas pelaksanaan program ketahanan pangan, serta mengidentifikasi kendala teknis dan non-teknis yang dihadapi OPD pengampu. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penyusunan rekomendasi yang lebih tajam dan terarah untuk triwulan IV, sehingga perencanaan dan penganggaran ke depan dapat lebih responsif dan tepat sasaran. Selain itu, aktualisasi ini mendukung fungsi pengendalian dan monitoring yang rutin dilakukan Bappeda, serta memperkuat akuntabilitas dan sinergi antar-OPD dalam mencapai target pembangunan daerah secara berkelanjutan.

3) Stakeholder

Aktualisasi ini memberikan manfaat penting bagi stakeholder, karena hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DKPP Kota Dumai di Triwulan III menjadi dasar untuk menyusun strategi peningkatan kinerja yang lebih tepat sasaran. OPD teknis dapat menyesuaikan program agar lebih efektif, masyarakat mendapat jaminan bahwa isu ketahanan pangan menjadi perhatian serius pemerintah, dan pemerintah pusat memperoleh bukti komitmen daerah dalam mendukung program nasional. Selain itu, evaluasi ini memperkuat sinergi antar sektor, mendorong transparansi, dan membuka ruang kolaborasi lintas instansi dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

F. Rencana Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

Tabel 4. 5 Matrik Tindak Lanjut Hasil Aktualisasi

No	Kegiatan	Output	Durasi dan waktu	Para pihak yang terlibat	Sumber Biaya	Keterangan
1	Menyusun catatan reflektif pribadi pasca aktualisasi	Naratif terkait refleksi atas proses pelaksanaan aktualisasi	10-14 Novermber	Diri sendiri	Tidak membutuhkan biaya	Mengevaluasi proses belajar dan penguatan nilai ASN
2	Menyampaikan hasil evaluasi kepada pimpinan Bappeda	Tindak lanjut atau arahan pimpinan	17-21 November	Pimpinan Bappeda, subkor, diri sendiri	Tidak membutuhkan biaya	Memberikan gambaran capaian dan rekomendasi perbaikan
3	Koordinasi lanjutan dengan DKPP	Dokumen kegiatan	24-29 Novermber	Diri sendiri, subkor, perwakilan DKPP	Tidak membutuhkan biaya	Menindaklanjuti rekomendasi evaluasi IKU
4	Monitoring pelaksanaan kegiatan DKPP	Laporan monitoring singkat	1-20 Desember	Tim Monev, perwakilan Dkpp	Biaya operasional OPD	Mengawal pelaksanaan program agar sesuai target

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Aktualisasi/Habitulasi Mata Pelatihan

a) Kegiatan Ke-1:

Kegiatan konsultasi dan permintaan persetujuan kepada mentor merupakan langkah awal yang sangat penting dalam pelaksanaan habituasi CPNS. Melalui proses ini, penulis memperoleh arahan yang jelas, validasi rencana kegiatan, serta masukan yang konstruktif untuk menyempurnakan pelaksanaan aktualisasi. Dalam kegiatan ini mengandung nilai BerAKHLAK, akuntabel, kompeten, dan harmonis.

b) Kegiatan Ke-2:

Kegiatan studi dokumen IKU dan Renstra DKPP Kota Dumai memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai arah kebijakan dan target kinerja yang harus dicapai oleh perangkat daerah dalam mendukung program ketahanan pangan. Melalui telaah dokumen tersebut, penulis mampu mengidentifikasi indikator prioritas, memahami strategi pencapaian, serta melihat keterkaitan antara perencanaan strategis dan pelaksanaan program di lapangan. Dalam kegiatan ini mengandung nilai BerAKHLAK, kompeten, adaptif, dan akuntabel.

c) Kegiatan Ke-3:

Kegiatan identifikasi data dan sumber informasi merupakan tahapan krusial dalam proses evaluasi kinerja perangkat daerah. Melalui kegiatan ini, penulis mampu mengumpulkan dan memverifikasi data dan sumber informasi terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) DKPP secara sistematis, serta menelusuri sumber informasi yang relevan seperti laporan triwulan, Renstra, Perjanjian Kinerja, dan hasil monitoring lapangan. Dalam kegiatan ini mengandung nilai BerAKHLAK, akuntabel, kompeten, dan berorientasi Pelayanan.

d) Kegiatan Ke-4:

Kegiatan analisis GAP dan potensi permasalahan pelaksanaan Indikator Kinerja Utama (IKU) DKPP Kota Dumai memberikan gambaran yang jelas mengenai perbedaan antara target kinerja yang telah ditetapkan dan realisasi capaian di lapangan. Dalam kegiatan ini mengandung nilai BerAKHLAK, akuntabel, kompeten, dan adaptif.

e) Kegiatan Ke-5:

Rapat dan diskusi bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait penyampaian hasil analisis data capaian IKU merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antar perangkat daerah, meningkatkan pemahaman terhadap kinerja yang telah dicapai, serta merumuskan tindak lanjut yang selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kota Dumai. Kegiatan ini mendukung tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berbasis data. Dalam kegiatan ini mengandung nilai BerAKHLAK, kolaboratif, harmonis, dan akuntabel.

f) Kegiatan Ke-6:

Penyampaian hasil evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DKPP Kota Dumai kepada atasan langsung merupakan bentuk pertanggungjawaban sekaligus wujud akuntabilitas penulis dalam pelaksanaan aktualisasi. Kegiatan ini memberikan ruang untuk menyampaikan temuan, analisis, dan rekomendasi secara langsung, serta membuka dialog konstruktif antara peserta dan pimpinan terkait tindak lanjut yang diperlukan. Dalam kegiatan ini mengandung nilai BerAKHLAK, akuntabel, loyal, dan berorientasi pelayanan.

g) Kegiatan Ke-7:

Penyusunan laporan aktualisasi merupakan tahapan penting dalam merefleksikan seluruh proses habituasi dan penerapan nilai-nilai dasar ASN di tempat kerja. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya mendokumentasikan kegiatan yang telah dilakukan, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap capaian, tantangan, serta dampak nyata dari kontribusi yang diberikan selama masa aktualisasi. Dalam kegiatan ini mengandung nilai BerAKHLAK, kompeten, akuntabel, dan adaptif.

2. Gagasan Kreatif Penyelesaian core isu

Gagasan kreatif yang diangkat dalam kegiatan aktualisasi adalah melakukan evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DKPP Kota Dumai secara sistematis,

dengan mengidentifikasi selisih antara target dan realisasi, serta mengkaji kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Evaluasi ini dilakukan dengan pendekatan berbasis dokumen perencanaan.

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi tersebut, penulis menyusun rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk mendorong peningkatan capaian IKU pada triwulan berikutnya, sekaligus memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program ketahanan pangan di daerah, dalam bentuk laporan hasil evaluasi capaian IKU.

3. Capaian hasil penyelesaian core isu

Penyelesaian core isu berupa serangkaian kegiatan yang dilakukan selama habituasi, yang kemudian menghasilkan capaian tersusunnya satu laporan hasil evaluasi terkait Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan pada urusan Pangan, sebagai gambaran awal yang berguna dalam menentukan rekomendasi dan tindak lanjut yang akan dilakukan.

B. Rekomendasi

1) Untuk penyelenggara Pelatihan

Rekomendasi dari penulis terhadap penyelenggara pelatihan adalah perlunya pengaturan jeda pemberian tugas secara proposional, agar peserta latsar memiliki waktu yang cukup untuk memahami materi dan menyelesaikan tugas dengan optimal, tambahan waktu khusus untuk pelatihan tematik yang disesuaikan dengan bidang tugas peserta, agar pemahaman lebih relevan dan merata. Hal ini penting, agar terwujudnya tujuan utama dari kegiatan Latsar CPNS.

2) Untuk Instansi Asal Peserta

Sebelum mengikuti Latsar CPNS, peserta perlu memahami secara menyeluruh tugas pokok, fungsi, struktur organisasi, serta program kerja unit kerjanya. Pembekalan awal ini sangat krusial karena:

- a. Membantu peserta menyusun rancangan aktualisasi yang relevan dan aplikatif, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di unit kerja.

- b. Meminimalkan kesenjangan pemahaman antara peserta dengan mentor, sehingga proses pendampingan berjalan lebih efektif.
- c. Mendorong peserta untuk berkontribusi secara nyata, bukan sekadar menjalankan kegiatan simbolik atau administratif.
- d. Memperkuat sinergi antara peserta dan instansi, karena peserta memahami bagaimana aktualisasi dapat mendukung pencapaian target kinerja instansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai. (2024). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024*. Pemerintah Kota Dumai.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2023). *Panduan Teknis Penulisan Rancangan Aktualisasi dan Laporan Aktualisasi: Pelatihan Dasar CPNS Regional Bukittinggi*. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Diakses dari Laporan Aktualisasi Kemendagri 2023
- Pemerintah Kota Dumai. (2025). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2025–2029*.
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai. (2025). *Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Tahun 2025–2029*. Pemerintah Kota Dumai
- Badan Pangan Nasional Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan*. Jakarta: Badan Pangan Nasional. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/307661/peraturan-bapanas-no-11-tahun-2023>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Laporan Mingguan Ke-IV September

Judul Kegiatan 1	Melakukan konsultasi, dan meminta persetujuan serta bimbingan mentor terkait kegiatan habituasi yang akan dilaksanakan
Tahapan Kegiatan	1. Membuat draf surat persetujuan kegiatan habituasi dengan judul aktualisasi yang telah diseminarkan 2. Menemui dan melakukan konsultasi dengan mentor 3. Meminta tanda tangan terhadap draf surat persetujuan yang telah dibuat
Pihak yang terlibat	1. Peserta 2. Mentor
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	22-26 September 2025
Deskripsi Proses dan kualitas Kegiatan	Kegiatan ini diawali dengan membuat draf surat persertuan kegiatan yang akan ditandatangani oleh mentor. Selanjutnya saya menemui mentor dan minta izin untuk berkonsultasi. Kegiatan konsultasi ini dilakukan secara informal, namun tetap mencerminkan semangat harmonis dan akuntabel.
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan	1. Tersedianya draf persetujuan kegiatan habituasi yang telah ditanda tangani oleh mentor 2. Tersedia dokumentasi atas kegiatan konsultasi 3. Tersedianya cacatan hasil saran dan masukan dari Mentor
Uraian Kegiatan Yang Dilaksanakan	

Uraian kegiatan dan keterkaitannya dengan Nilai BerAKHLAK	1. Membuat draf surat persetujuan kegiatan habituasi dengan judul aktualisasi yang telah diseminarkan Akuntabel, kegiatan ini merupakan bentuk tanggung jawab administratif dalam memastikan bahwa rencana aktualiasi telah diketahui dan disetujui oleh mentor. Kompeten, membuat draf persetujuan kegiatan dengan kaidah tata naskah dinas dan substansi kegiatan yang telah diseminarkan. Harmonis, membangun hubungan kerja yang saling menghargai antara peserta dan mentor. 2. Menemui dan melakukan konsultasi dengan mentor Akuntabel, menyampaikan rencana kegiatan secara jelas dan bertanggungjawab Harmonis, karena dilakukan melalui komunikasi langsung yang terbuka, sopan dan saling menghargai Kompeten, tercermin dari kesiapan dalam menjelaskan kegiatan dan menerima masukan untuk penyempurnaan. 3. Tersedianya catatan hasil saran dan masukan dari mentor. Akuntabel, dengan nunjukkan tanggung jawab dalam mencatat dan menindaklanjuti arahan pembimbing. Adaptif, terbuka terhadap perubahan dan siap menyempurnakan rencana berdasarkan masukan yang diterima. Harmonis, melalui interaksi yang saling menghargai
--	---

Teknik Aktualisasi yang dipergunakan	Teknik yang digunakan adalah meliputi komunikasi langsung secara sopan dan terbuka untuk menyampaikan rencana kegiatan. Membuat draf surat persetujuan dan meminta tanda tangan mentor sebagai bukti sah pelaksanaan.
Kontribusi Terhadap Unit Kerja	Kegiatan ini berkontribusi dengan memastikan rencana aktualisasi selaras dengan arah kerja unit, memperkuat koordinasi dan akuntabilitas, serta menghasilkan dokumentasi yang mendukung kelancaran pelaksanaan.
Dampak jika Aktualisasi tidak dilakukan dengan NDS	Maka aktualisasi beresiko minim kolaborasi atau komunikasi dan kurang adaptif terhadap masukan dan tidak menunjukkan loyalitas terhadap tujuan organisasi
Output Kegiatan 1 Tahap 1	 Gambar. Surat Persetujuan dari Mentor

Output Kegiatan 1

Tahap 2



Gambar. Catatan saran dan masukan dalam kegiatan konsultasi

Output Kegiatan 1 Tahap 3



Gambar. Rencana kegiatan terkait Aktualisasi

Lampiran 2 Laporan Minggu Ke-IV September

Judul Kegiatan 2	Melakukan Studi Dokumen Terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) dan LKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai
Tahapan Kegiatan	1. Mengidentifikasi dokumen yang relevan (Renstra dan Lkip) 2. Membaca dan mencatat indikator yang berkaitan dengan ketahanan pangan 3. Menyusun ringkasan pemahaman dan mengaitkan dengan tugas perencanaan
Pihak yang terlibat	1. Peserta 2. Mentor
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	22-26 September 2025
Deskripsi Proses dan kualitas Kegiatan	Kegiatan ini dilakukan dalam rentang waktu yang sudah di jadwalkan, yang diawali dengan Meminta persetujuan Mentor terkait pelaksanaan kegiatan aktualisasi, selanjutnya melakukan studi dokumen terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) dan LKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai. Kegiatan ini diupayakan dengan pelaksanaan yang tertib dan berbasis data resmi, agar mencerminkan tanggungjawab terkait tahapan kegiatan yang dilakukan.
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan	1. Lampiran ringkasan dokumen IKU dan Lkip yang yang relevan dengan ketahanan pangan 2. Tersedianya catatan daftar indikator yang berkaitan dengan ketahanan pangan. 3. Tersedianya paragraf ringkasan terkait indikator yang digunakan di Renstra

Uraian Kegiatan Yang Dilaksanakan	
Uraian kegiatan dan keterkaitannya dengan Nilai BerAKHLAK	Mengidentifikasi dokumen Renstra dan LKIP mencerminkan nilai loyal karena dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap arah kebijakan pemerintah dan pencapaian visi pembangunan. Membaca dan mencatat indikator ketahanan pangan menunjukkan nilai kompeten karena membutuhkan pemahaman teknis dan kemampuan analisis terhadap data dan indikator kinerja. Menyusun ringkasan pemahaman dan mengaitkan dengan tugas perencanaan mencerminkan nilai akuntabel karena hasil analisis digunakan untuk menyusun rekomendasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara profesional.
Teknik Aktualisasi yang dipergunakan	Teknik yang digunakan adalah studi dokumen dan analisis konten, yaitu menelaah isi Renstra dan LKIP untuk menemukan indikator dan sasaran strategis yang berkaitan dengan ketahanan pangan.
Kontribusi Terhadap Unit Kerja	Kegiatan ini diharapkan berkontribusi langsung terhadap penguatan fungsi perencanaan, dengan menganalisis berbagai sumber data terkait ketahanan pangan.
Dampak jika Aktualisasi tidak dilakukan dengan NDS	Maka perencanaan menjadi kurang tepat, data yang digunakan tidak dapat dipertanggungjawabkan

Output Kegiatan 2 Tahap 1	Gambar. Dokumen yang digunakan sebagai Referensi terkait Ketahanan Pangan
Output Kegiatan 2 Tahap 2	Gambar. Daftar Indikator yang berkaitan dengan Ketahanan Pangan

	<table><tr><th>INSTRUMEN PENGUKURAN YANG RELEVAN</th><th>TUJUAN</th><th>SASARAN</th><th>INDIKATOR</th><th>2024</th><th>2025</th></tr><tr><th>(K1)</th><th>(K2)</th><th>(S1)</th><th>(I1)</th><th>(I2)</th><th>(I3)</th></tr><tr><td colspan="6">8.27.0.M.02.008 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN</td></tr><tr><td>7.2. Berkelanjutan, adil, tangguh dan inklusif pangan</td><td rowspan="6">Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau serta kesejahteraan petani</td><td rowspan="6">Meningkatkan ketahanan pangan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau</td><td>Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (index)</td><td>78,5</td><td>77,0</td></tr><tr><td>1.3. Produktivitas Ekonomi</td><td>Nilai Tukar Petani (NTP) (index)</td><td>158,00</td><td>158,0</td></tr><tr><td></td><td>Skor Pola Pangan Harapan (JPH)</td><td>87,6</td><td>88,0</td></tr><tr><td></td><td>Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)</td><td>3,62</td><td>3,65</td></tr><tr><td></td><td>Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)</td><td>90,0</td><td>93,8</td></tr><tr><td></td><td>Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)</td><td>7,820</td><td>7,81</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Peningkatan Produksi Hortikultura (Tun)</td><td>15,90</td><td>15,80</td></tr></table>	INSTRUMEN PENGUKURAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2024	2025	(K1)	(K2)	(S1)	(I1)	(I2)	(I3)	8.27.0.M.02.008 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN						7.2. Berkelanjutan, adil, tangguh dan inklusif pangan	Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau serta kesejahteraan petani	Meningkatkan ketahanan pangan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (index)	78,5	77,0	1.3. Produktivitas Ekonomi	Nilai Tukar Petani (NTP) (index)	158,00	158,0		Skor Pola Pangan Harapan (JPH)	87,6	88,0		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	3,62	3,65		Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	90,0	93,8		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	7,820	7,81				Peningkatan Produksi Hortikultura (Tun)	15,90	15,80
INSTRUMEN PENGUKURAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	2024	2025																																														
(K1)	(K2)	(S1)	(I1)	(I2)	(I3)																																														
8.27.0.M.02.008 - DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN																																																			
7.2. Berkelanjutan, adil, tangguh dan inklusif pangan	Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau serta kesejahteraan petani	Meningkatkan ketahanan pangan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (index)	78,5	77,0																																														
1.3. Produktivitas Ekonomi			Nilai Tukar Petani (NTP) (index)	158,00	158,0																																														
			Skor Pola Pangan Harapan (JPH)	87,6	88,0																																														
			Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	3,62	3,65																																														
			Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Persentase)	90,0	93,8																																														
			Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase)	7,820	7,81																																														
			Peningkatan Produksi Hortikultura (Tun)	15,90	15,80																																														
	Tabel. Daftar Indikator Kinerja Utama yang Digunakan dalam Evaluasi																																																		
	<table><tr><th>No</th><th>Indikator Kinerja Utama</th></tr><tr><td>1</td><td>Skor Pola Pangan Harapan</td></tr><tr><td>2</td><td>Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan</td></tr><tr><td>3</td><td>Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan</td></tr></table>					No	Indikator Kinerja Utama	1	Skor Pola Pangan Harapan	2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	3	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan																																						
No	Indikator Kinerja Utama																																																		
1	Skor Pola Pangan Harapan																																																		
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan																																																		
3	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan																																																		
Output Kegiatan 2 Tahap 3	Paragraf Ringkasan Terkait Indikator Kinerja Utama yang Digunakan 1. Skor Pola Pangan Harapan Menurut Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2023, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) adalah Nilai kualitas keragaman konsumsi pangan penduduk di suatu wilayah berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi menurut kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi, baik dalam jumlah maupun mutu, dengan mempertimbangkan aspek daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Perhitungan skor PPH dilakukan terhadap Data konsumsi Pangan dalam satuan energi (kkal) per kelompok pangan. untuk itu, sebelum menghitung skor PPH perlu melakukan																																																		

konversi satuan, perubahan bentuk jenis pangan menjadi bentuk Pangan asli, dan melakukan pengelompokan jenis Pangan yang dikonsumsi berdasarkan 9 (Sembilan) kelompok Pangan pph.

Skor PPH	Interpretasi Konsumsi Pangan
0-50	Sangat tidak beragam dan tidak seimbang
51-70	Kurang beragam dan belum seimbang
71-90	Cukup beragam dan mulai seimbang
91-100	Sangat beragam dan bergizi seimbang

2. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan

Persentase daerah rentan rawan pangan adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi wilayah administratif (kabupaten/kota) yang tergolong dalam kategori kerentanan pangan tinggi terhadap total wilayah yang dianalisis dalam suatu periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan tingkat kerawanan pangan secara spasial dan temporal, serta menjadi dasar dalam perencanaan intervensi kebijakan ketahanan pangan nasional daerah.

Indikator ini merujuk pada Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA) yang membagi wilayah ke dalam 6 kategori prioritas:

Kategori	Tingkat Kerentanan	Makna
1	Sangat Rentan	Perlu intervensi segera
2	Rentan	Perlu perhatian khusus
3	Agak Rentan	Perlu monitoring dan dukungan
4	Agak Tahan	Relatif stabil, tetap dipantau
5	Tahan	Kondisi baik, tetap dijaga
6	Sangat Tahan	Ketahanan pangan sangat baik

3. Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)

	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan adalah indikator yang menunjukkan proporsi pangan segar yang telah diuji dan dinyatakan aman serta sesuai standar mutu, dibandingkan dengan total pangan segar yang beredar atau diuji dalam suatu wilayah dan periode tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat keamanan pangan segar yang dikonsumsi masyarakat, serta efektivitas pengawasan dan pengendalian mutu oleh pemerintah daerah dan pusat. Pangan segar adalah bahan pangan yang belum mengalami proses pengolahan, dan biasanya dikonsumsi langsung atau setelah dimasak, diantaranya sayuran dan buah-buahan, daging segar (sapi, ayam, kambing), ikan dan hasil laut, telur, produk pertanian segar lainnya. Pangan segar dinyatakan memenuhi persyaratan jika lolos uji terhadap, diantaranya sebagai berikut: 1. Residu Pestisida, digunakan dalam budidaya tanaman harus berada di bawah ambang batas maksimum residu (MRL) 2. Cemarkan Mikrobiologi, seperti Salmonella, E-Coli, Listeria yang dapat menyebabkan penyakit bawaan pangan 3. Logam Berat, termasuk merkuri, timbal, kadmium yang berasal dari pencemaran lingkungan atau kemasan 4. Zat adiktif berbahaya, formalin, boraks, pewarna tekstil, sering ditemukan pada produk hewani dan olahan pasar.
--	--

Lampiran 3 Laporan Minggu Ke-IV September

Judul Kegiatan 3	Melakukan Identifikasi data dan sumber informasi yang akan digunakan
Tahapan Kegiatan	1. Menentukan sumber data yang akan digunakan 2. Mengumpulkan dan mengklasifikasi data capaian iku 3. Membuat tabel realisasi capaian terhadap target IKU
Pihak yang terlibat	4. Peserta 5. Mentor
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	26-30 September
Deskripsi Proses dan kualitas Kegiatan	Kegiatan ini dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan sumber data yang akan digunakan dalam evaluasi capaian iku, dan selanjutnya mengumpulkan dan mengklasifikasi data capaian iku. Dalam hal ini evaluasi difokuskan pada 3 indikator kinerja utama (iku) yaitu Skor Pola Pangan Harapan (Skor PPH), Persentase Daerah Rawan Pangan (%), dan Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan mutu Keamanan Pangan (%), dengan memperhatikan capaian 3 program terkait urusan pangan pada laporan triwulan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai.
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan	1. Tersedianya daftar sumber data utama 2. Tersedianya data capaian iku hingga triwulan III 2025 3. Tersedianya tabel capaian IKU terhadap target yang telah ditetapkan yang tertuang dalam program terkait pangan
Uraian Kegiatan Yang Dilaksanakan	

Uraian kegiatan dan keterkaitannya dengan Nilai BerAKHLAK	Berorientasi Pelayanan, mengutamakan data yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Akuntabel, Menggunakan sumber data resmi dan dapat dipertanggung jawabkan Kompeten, Memahami indikator terkait ketahanan pangan Harmonis, Melibatkan lintas OPD dalam hal ketersediaan data Loyal, Mendukung pencapaian target program nasional terkait ketahanan pangan Adaptif, Menggunakan data yang sesuai dengan waktu Kolaboratif, Mengintegrasikan data dari berbagai sektor untuk evaluasi
Teknik Aktualisasi yang dipergunakan	Teknik yang digunakan adalah dengan berkonsultasi bersama mentor dan menandai informasi penting mengelompokkan data berdasarkan sumber yang ada, dan selanjutnya mencari data realisasi capaian itu terhadap target yang telah ditetapkan
Kontribusi Terhadap Unit Kerja	Melakukan identifikasi data dan sumber informasi membantu Bappeda menyusun perencanaan berbasis bukti.
Dampak jika Aktualisasi tidak dilakukan dengan NDS	Aktualisasi tanpa NDS akan kehilangan makna, arah dan dampak. Sebaliknya, jika dilakukan dengan menginternalisasi nilai BerAKHLAK dan NDS, aktualisasi menjadi alat transformasi diri dan kontribusi nyata bagi instansi dan masyarakat.

Output Kegiatan 3 Tahap 1	Dokumen yang digunakan dan Penjelasan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Dumai Renstra (Rencana Strategis) menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan indikator kinerja DKPP selama periode lima tahun. Evaluasi IKU harus mengacu pada arah kebijakan dan target yang tertuang didalamnya. Dengan menggunakan Renstra, evaluasi IKU dapat menilai apakah program dan kegiatan DKPP benar-benar mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah direncanakan. Renstra memuat indikator-indikator yang telah disepakati dan diselaraskan dengan RPJMD Kota Dumai serta kebijakan nasional. Ini menjamin bahwa evaluasi IKU tidak keluar dari konteks pembangunan daerah. Hasil evaluasi IKU yang mengacu pada Renstra dapat digunakan untuk menyusun rekomendasi yang tepat sasaran, baik untuk revisi program, penguatan kegiatan, maupun perencanaan tahun berikutnya, dan juga menunjukkan bahwa DKPP bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. LKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian LKIP adalah singkatan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, ini merupakan dokumen resmi yang disusun oleh setiap instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah	
--	--	--

	dipercayakan kepada mereka selama satu tahun anggaran. LKIP Dinas Ketahanan dan Pertanian Kota Dumai merupakan perwujudan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan berpedoman pada permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja ini juga memudahkan organisasi mengetahui dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja, tugas-tugas pokok dan fungsinya pada kewenangan urusan di bidang ketahanan pangan, tanaman pangan dan hortikultura, bidang perkebunan, bidang peternakan, bidang keswan kesmavet dan bidang penyuluhan. Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran Hingga Triwulan III Tahun 2025 Laporan Realisasi Kinerja dan Anggaran adalah dokumen yang menyajikan informasi tentang pencapaian kinerja fisik dan penyerapan anggaran suatu instansi pemerintah dalam periode tertentu, biasanya per triwulan atau tahunan. Laporan ini digunakan untuk menilai sejauh mana program dan	
--	--	--

	kegiatan yang direncanakan telah digunakan sesuai target dan anggaran yang dialokasikan. Tujuan laporan ini adalah menunjukkan transparansi pelaksanaan program, menilai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan, dan menjadi dasar pengambilan keputusan untuk triwulan berikutnya atau tahun anggaran selanjutnya.	
--	---	--

Output Kegiatan 3 Tahap 2	Tersedianya data capaian IKU hingga triwulan III 2025											
	INDIKATOR		TARGET TAHUN 2025		CAPAIAN TARGET DAN MELAKUKAN DALAM TRIWULAN							
					TRI I		TRI II		TRI III		TRI IV	
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	1. Rasio Peta Pangan (Rasio)	80,74	22,22	22,22	44,44	44,44	66,66	66,66	88,88	88,88	Up Target	
2. Persentase Gagal Raman Pangan (%)	0,00	0,76	0,76	1,52	1,52	2,27	2,27	3,00	3,00	On Progress		
3. Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan mutu Keamanan Pangan (%)	100	25	25	50	50	75	50	100	100	Up Target		

Output Kegiatan 3 Tahap 3

Tersedianya tabel capaian IKU terhadap target yang telah ditetapkan yang tertuang dalam program urusan pangan

KAPASITAS PRODUKSI		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
1. Rasio Peta Pangan (Rasio)		22,22	22,22	44,44	44,44	66,66	66,66	88,88	88,88
2. Persentase Gagal Kapan (Rasio)		0,76	0,76	1,52	1,52	2,27	2,27	3,00	3,00
3. Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan mutu Keamanan Pangan (%)		25	25	50	50	75	75	100	100

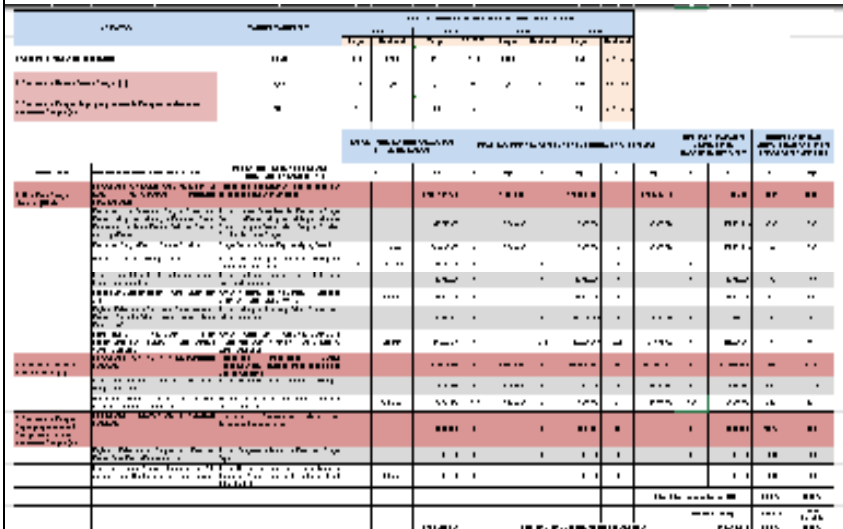
KAPASITAS PRODUKSI		Target		Realisasi		Target		Realisasi	
1. Rasio Peta Pangan (Rasio)		22,22	22,22	44,44	44,44	66,66	66,66	88,88	88,88
2. Persentase Gagal Kapan (Rasio)		0,76	0,76	1,52	1,52	2,27	2,27	3,00	3,00
3. Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan mutu Keamanan Pangan (%)		25	25	50	50	75	75	100	100

Lampiran 4 Laporan Minggu Ke-I Oktober

Judul Kegiatan 4	Melakukan Analisis GAP dan Potensi Permasalahan Pelaksanaan IKU
Tahapan Kegiatan	1. Menyusun format analisis gap (target vs capaian) 2. Mengisi format dengan data dan mengidentifikasi permasalahan/kendala teknis/substansi 3. Menyusun rekomendasi tindak lanjut yang diberikan terhadap permasalahan
Pihak yang terlibat	1. Peserta 2. Mentor
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	1-7 Oktober 2025
Deskripsi Proses dan kualitas Kegiatan	Kegiatan ini dilakukan setelah kegiatan 3 pada tahap 3 selesai, kemudian dilanjutkan dengan menambahkan kolom gap pada matrik yang telah tersedia. Untuk kemudian dilakukan identifikasi terkait permasalahan/kendala teknis/substansi berdasarkan data-data sebelumnya, dan diberikan rekomendasi tindak lanjut terhadap permasalahan/kendala yang dihadapi. Dalam kegiatan ini, juga dibutuhkan masukan dan rekomendasi dari mentor.
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan	1. Tersedianya tabel analisis gap capaian 2. Tersedianya daftar kendala teknis/substansi dalam pencapaian target 3. Tersedianya daftar rekomendasi terkait kendala
Uraian Kegiatan Yang Dilaksanakan	
Uraian kegiatan dan keterkaitanny	Berorientasi Pelayanan , Analisis GAP memastikan bahwa program pangan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, seperti ketahanan dan akses pangan.

a dengan Nilai BerAKHLAK	Akuntabel, Evaluasi berbasis data menunjukkan tanggungjawab ASN dalam menyampaikan capaian dan kendala secara transparan. Kompeten, Kegiatan ini menuntut kemampuan teknis dan analitis untuk mengidentifikasi akar masalah dan menyusun solusi strategis. Harmonis, Kolaborasi lintas OPD dalam evaluasi menciptakan hubungan kerja yang sinergis Loyal, Komitmen terhadap pencapaian IKU mencerminkan dedikasi terhadap visi pembangunan pangan daerah Adaptif, Analisis GAP mendorong penyesuaian program agar lebih responsif terhadap dinamika lokal seperti inflasi pangan atau bencana. Kolaboratif, Proses kegiatan ini melibatkan berbagai pihak dalam memberikan rekomendasi solusi atas kendala yang dihadapi.
Teknik Aktualisasi yang dipergunakan	Dalam kegiatan ini, bertujuan untuk mengukur selisih antara target dan realisasi, serta mengidentifikasi kendala seperti kurangnya koordinasi, data, atau anggaran, kemudian barulah diberikan beberapa solusi atau rekomendasi berdasarkan permasalahan yang dihadapi.
Kontribusi Terhadap Unit Kerja	Diharapkan analisis GAP membantu dalam memahami sejauh mana capaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terhadap target IKU ketahanan pangan. Dengan data ini Bappeda dapat menyusun rencana kerja yang lebih realistis dan berbasis kebutuhan aktual.
Dampak jika Aktualisasi tidak	Jika analisis GAP dan identifikasi potensi permasalahan pelaksanaan IKU tidak dilakukan dengan pendekatan Nilai Dasar ASN, maka hasilnya beresiko tidak akurat, tidak transparan, dan kurang berdampak. Tanpa nilai nasionalisme

dilakukan dengan NDS	dapat membuat analisis tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
----------------------	--

Output Kegiatan 4 Tahap 1	Tabel analisis gap antara target dan capaian
	

Output Kegiatan 4 Tahap 2

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN
	Skor Pola Pangan Harapan	Target Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Dumai tahun 2025 sebesar 88,78 belum tercapai, karena hingga Triwulan III baru mencapai 83,6. Selisih ini menunjukkan bahwa meskipun program berjalan dan serapan anggaran tinggi, pola konsumsi pangan masyarakat belum sepenuhnya beragam dan bergizi seimbang. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan intervensi, terutama dalam edukasi gizi, peningkatan akses pangan bergizi, dan pelaksanaan subkegiatan yang belum berjalan.
2	Persentase Daerah Rawan Pangan	Persentase Daerah Rawan Pangan di Kota Dumai pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 3,03% , namun hingga Triwulan III (TW 3) , realisasinya telah mencapai 1,87% . Capaian ini menunjukkan hasil yang positif karena angka realisasi lebih rendah dari target, yang berarti jumlah daerah rawan pangan berhasil ditekan. Meskipun

		demikian, evaluasi tetap diperlukan untuk memastikan bahwa penurunan tersebut bersifat berkelanjutan dan tidak bersifat sementara, serta bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar menjangkau masyarakat yang rentan terhadap kerawanan pangan.
3	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan bukanlah indikator yang ditargetkan mencapai 100%, karena penilaiannya bergantung pada hasil pengujian sampel pangan segar yang beredar di masyarakat. Pada Triwulan III, capaian indikator ini berada di angka 50% , yang menunjukkan bahwa dari seluruh sampel yang diuji, hanya separuhnya yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan segar. Capaian ini mengindikasikan masih adanya potensi risiko keamanan pangan di tingkat konsumen, sehingga diperlukan penguatan pengawasan, edukasi pelaku usaha, serta peningkatan sarana dan kapasitas laboratorium pengujian di daerah.

Output Kegiatan 4 Tahap 3

1	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REKOMENDASI
	Skor Pola Pangan Harapan	Kendala Konsumsi pangan belum beragam, dominan pada sumber karbohidrat, Rendahnya konsumsi protein hewani, sayur, dan buah, Edukasi gizi belum optimal di masyarakat. Rekomendasi Perluasan kampanye konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman), Intervensi program edukasi gizi di sekolah dan komunitas, Penguatan produksi dan distribusi pangan lokal yang beragam.

2	Persentase Daerah Rawan Pangan	Kendala Belum semua wilayah terjangkau intervensi program, Ketimpangan akses pangan antar kecamatan. Rekomendasi Lanjutkan pemetaan dan intervensi daerah rawan pangan secara berkala, Perkuat sinergi lintas sektor untuk distribusi pangan ke wilayah rentan, Dorong partisipasi masyarakat dalam program ketahanan pangan berbasis lokal.
3	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (%)	Kendala Masih banyak produk pangan segar yang belum memenuhi standar keamanan, Sarana pengujian dan pengawasan belum merata. Rekomendasi Tingkatkan kapasitas laboratorium pengujian di daerah, Lakukan pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku usaha pangan segar, Perkuat pengawasan rutin terhadap produk pangan di pasar dan distribusi.

Lampiran 5 Laporan Minggu Ke-II Oktober

Judul Kegiatan 5	Melakukan Rapat Koordinasi bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terkait penyampaian hasil analisis terhadap data capaian IKU
Tahapan Kegiatan	1. Mempersiapkan undangan rapat koordinasi serta pendukung pelaksanaan rapat (absensi rapat, dan perlengkapan lainnya). 2. Menyampaikan hasil analisis terhadap capaian IKU kepada DKPP 3. Membuat notulensi hasil rapat
Pihak yang terlibat	1. Peserta 2. Mentor 3. DKPP
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	8-14 Oktober 2025
Deskripsi Proses dan kualitas Kegiatan	Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun undangan rapat, menyiapkan bahan diskusi. Kemudian pelaksanaan kegiatan rapat dan diskusi terkait capaian, kendala, dan rekomendasi yang sesuai dari kondisi yang terjadi, dilanjutkan dengan pembuatan notulensi rapat.
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan	1. Tersedianya undangan rapat koordinasi serta pendukung pelaksanaan rapat (absensi rapat, monitor, dan perlengkapan lainnya) 2. Tersedianya dokumentasi pelaksanaan rapat 3. Tersedianya ringkasan hasil rapat koordinasi
Uraian Kegiatan Yang Dilaksanakan	

Uraian kegiatan dan keterkaitannya dengan Nilai BerAKHLAK	Berorientasi Pelayanan, menyusun dan menyampaikan analisis IKU untuk membantu OPD lain berkerja lebih baik demi masyarakat. Akuntabel, membuat notulensi rapat sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dokumentasi resmi kegiatan. Kompeten, upaya dalam hal penguasaan terhadap tugas dan indikator kinerja yang relevan. Harmonis, melibatkan DKPP dan berbagai pihak dalam koordinasi menunjukkan semangat kerja sama dan hubungan yang baik. Loyal, karena mendukung pencapaian program nasional dan tujuan strategis daerah. Adaptif, berupaya menyesuaikan jadwal atau metode rapat jika diperlukan. Kolaboratif, bekerjasama lintas sektor agar perencanaan dan pelaksanaan program bisa saling mendukung
Teknik Aktualisasi yang dipergunakan	Menerapkan teknik aktualisasi melalui kegiatan rapat koordinasi dengan DKPP. Dimulai dari identifikasi masalah dan analisis data IKU, saya menyusun hasil analisis dan menyampaikannya secara efektif dalam forum rapat. Seluruh proses dilengkapi dengan dokumentasi seperti undangan, absensi, dan notulensi sebagai bentuk akuntabilitas.
Kontribusi Terhadap Unit Kerja	Kontribusi terhadap unit kerja sebagai perencana di Bappeda tercermin melalui kegiatan rapat koordinasi dan penyampaian hasil analisis capaian IKU kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Melalui analisis yang saya susun, unit kerja mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang efektivitas program dan capaian

	kinerja, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kebijakan. Selain itu, dokumentasi kegiatan seperti absensi dan notulensi memperkuat akuntabilitas dan transparansi.
Dampak jika Aktualisasi tidak dilakukan dengan NDS	Kalau aktualisasi tidak dilakukan dengan nilai-nilai BerAKHLAK, maka kegiatan bisa jadi hanya formalitas tanpa makna. Hasil kerja bisa kurang jelas, tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan tidak berdampak nyata. Koordinasi antar OPD bisa lemah, pelayanan ke masyarakat jadi kurang maksimal, dan peran ASN sebagai pelayan publik tidak terlihat. Nilai BerAKHLAK penting agar setiap kegiatan punya arah, tanggung jawab, dan manfaat yang nyata.
Output Kegiatan 5 Tahap 1	 PEMERINTAH KOTA DUMAI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jalan Pahlawan Tondokan, Bagian Selatan, Dumai Kota, Dumai Riau 28982 Telepon (0755) 4502097 Faksimili (0755) Laman berpeda.dumai.go.id Dumai, 15 Oktober 2025 Nomor : E30/24/BPPD/DA-Sew Sifat : Dinas Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Undangan Yth. Pejabat yang Menduduki Kelurahan Pagaran Dinas Kelurahan Pagaran dan Perwakilan Kota Dumai di- Bersama Gelubungan dengan kegiatan pelaksanaan aktualisasi CPNS Tahap 2025 kegiatan "Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelurahan Pagaran dan Perwakilan Sebagai Pengampu Program Nasional Terkait Ketahanan Pangan". Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri kegiatan rapat dan diskusi yang akan dilaksanakan pada : Hari/Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025 Pukul : 09.00 WIB s.d. Selesai Tempat : Ruang Rapat Rangsang PSDABK Kegiatan ini bertujuan untuk mendiskusikan terkait ketercapaian dan kendala dalam mencapai target IKU Dinas Kelurahan Pagaran dan Perwakilan, agar rekomendasi yang dihasilkan lebih tepat sasaran. Dengan ini kami mengundang, ini disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya Bapak/Ibu diucapkan terima kasih. Formal Satrio Kepala Bidang Kepala Bidang Penanganan SDA, Infrastruktur dan Kearsifan Satrio, Satrio, Satrio NIP. 19800207 200504 2 001 Satrio, Satrio, Satrio NIP. 19870628 201301 1 009

**Output Kegiatan
5 Tahap 2**



**Output Kegiatan
5 Tahap 3**

Ringkasan hasil rapat koordinasi

Rapat dan diskusi evaluasi capaian indikator kinerja utama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Dumai telah dilaksanakan dengan fokus pada dukungan pelaksanaan program nasional terkait ketahanan pangan. Dalam rapat ini, dipaparkan perkembangan realisasi fisik dan anggaran dari berbagai kegiatan yang telah direncanakan. Meskipun terdapat sejumlah capaian yang menunjukkan progres positif, masih ditemukan beberapa sub kegiatan dalam tiga program urusan pangan yang belum optimal pelaksanaannya, bahkan ada yang belum terlaksana sama sekali. Hal ini menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi pencapaian target kinerja secara keseluruhan.

Sebagai tindak lanjut, rapat menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis, antara lain percepatan pelaksanaan kegiatan yang tertunda, penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan intensitas monitoring dan evaluasi. Seluruh peserta rapat sepakat

	untuk menyusun laporan resmi yang memuat hasil evaluasi dan rekomendasi tersebut sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dan langkah perbaikan ke depan. Laporan ini diharapkan menjadi acuan dalam memastikan efektivitas pelaksanaan program ketahanan pangan di Kota Dumai secara berkelanjutan.
--	--

Lampiran 6 Laporan Minggu Ke-III Oktober

Judul Kegiatan 6	Melakukan Penyampaian hasil evaluasi ke atasan langsung
Tahapan Kegiatan	1. Menyusun ringkasan hasil evaluasi dalam format yang komunikatif 2. Menyampaikan hasil secara langsung atau melalui laporan tertulis 3. Menerima masukan dari atasan dan menyesuaikan rekomendasi jika diperlukan
Pihak yang terlibat	1. Peserta 2. Mentor
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	15-21 Oktober 2025
Deskripsi Proses dan kualitas Kegiatan	Tahapan kegiatan ini dilakukan dengan terlebih dahulu menyusun ringkasan hasil evaluasi dalam format yang jelas dan mudah dipahami, lalu menyampaikannya kepada atasan secara langsung atau tertulis. Setelah itu, meminta dan menerima masukan serta menyesuaikan rekomendasi sesuai arahan. Proses ini menunjukkan komunikasi yang efektif, keterbukaan terhadap umpan balik, serta komitmen untuk meningkatkan kualitas perencanaan.

Daftar Lampiran Bukti Kegiatan	1. Tersedianya bukti penyampaian hasil evaluasi (berita acara, tanggapan atasan atau dokumen komunikasi) 2. Tersedianya dokumentasi terkait penyampaian hasil evaluasi kepada atasan 3. Tersedianya bukti catatan rekomendasi atasan jika diperlukan.
Uraian Kegiatan Yang Dilaksanakan	
Uraian kegiatan dan keterkaitannya dengan Nilai BerAKHLAK	Berorientasi Pelayanan, dengan berupaya menyusun ringkasan agar informasi disajikan secara jelas dan bermanfaat. Akuntabel, dengan menyampaikan hasil secara langsung atau tertulis, berupaya menunjukkan tanggungjawab atas isi evaluasi dan transparansi. Kompeten, berupaya membuat ringkasan yang komunikatif Harmonis, proses komunikasi dengan atasan dilakukan dengan sikap terbuka dan saling menghargai. Loyal, menyampaikan hasil evaluasi dan menyesuaikan rekomendasi untuk mendukung arah kebijakan

	Adaptif, berupaya menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi terhadap kebijakan Kolaboratif, berupaya memperkuat kerjasama antar perencana dalam mencapai tujuan bersama.
Teknik Aktualisasi yang dipergunakan	Dalam kegiatan penyampaian hasil evaluasi ke atasan langsung, saya menggunakan teknik aktualisasi berupa analisis data untuk menyusun ringkasan yang komunikatif, komunikasi efektif saat menyampaikan hasil secara langsung atau tertulis, serta penerimaan umpan balik dengan sikap adaptif. Teknik ini mendukung proses evaluasi yang akuntabel, memperkuat koordinasi, dan memastikan rekomendasi yang disampaikan relevan serta dapat ditindaklanjuti.
Kontribusi Terhadap Unit Kerja	Kontribusi terhadap unit kerja adalah membantu menyampaikan hasil evaluasi secara jelas, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Dengan menerima masukan dan menyesuaikan rekomendasi, agar rencana kerja lebih

	sesuai dengan kebutuhan organisasi, demi mendorong kelancaran koordinasi dan peningkatan kinerja unit.
Dampak jika Aktualisasi tidak dilakukan dengan NDS	Jika penyampaian hasil evaluasi kepada atasan langsung tidak dilakukan sesuai dengan nilai dasar BerAKHLAK, maka dapat timbul berbagai dampak negatif seperti kurangnya transparansi, melemahnya akuntabilitas, serta terganggunya hubungan kerja yang harmonis.
Output Kegiatan 6 Tahap 1	 Screenshot cover laporan evaluasi
Output Kegiatan 6 Tahap 2	



Lampiran 7 Laporan Minggu Ke-IV Oktober

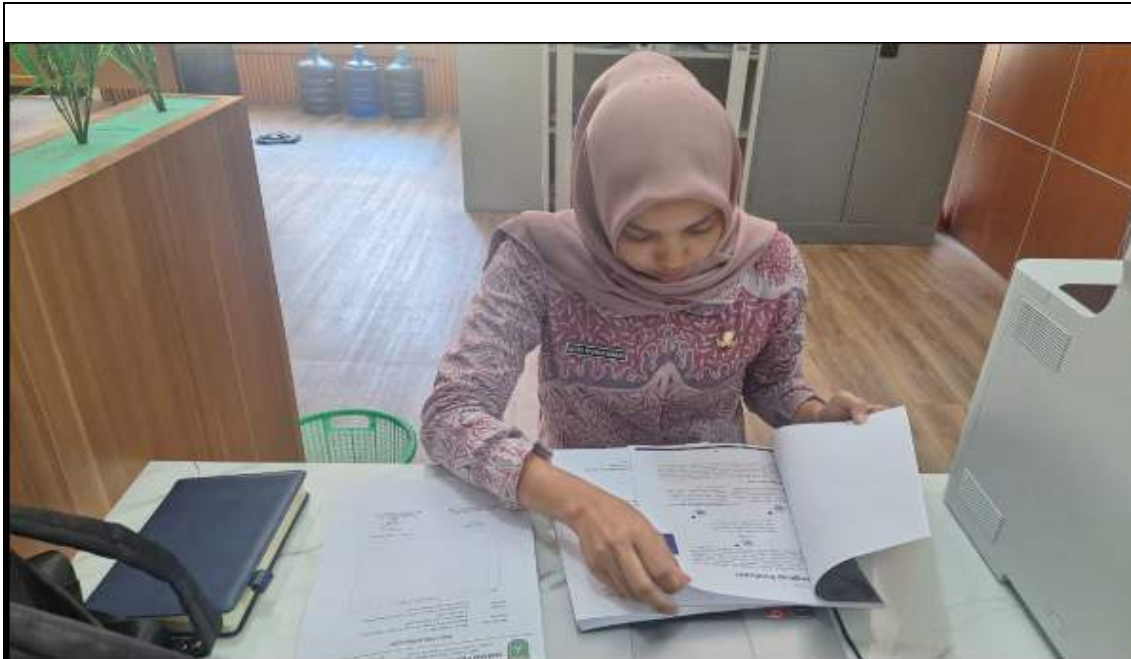
Judul Kegiatan 7	Membuat Laporan Aktualisasi Kegiatan
Tahapan Kegiatan	1. Mengumpulkan seluruh dokumen pendukung kegiatan habituasi 2. Menulis laporan aktualisasi 3. Melakukan review laporan agar sesuai dengan kaidah bahasa, format dan substansi yang telah ditetapkan.
Pihak yang terlibat	1. Peserta
Waktu Pelaksanaan Kegiatan	22-31 Oktober 2025
Deskripsi Proses dan kualitas Kegiatan	Pembuatan laporan aktualisasi aktualisasi dilakukan melalui proses pengumpulan dokumen pendukung seperti foto, dan laporan kegiatan, dilanjutkan dengan penulisan laporan yang sistematis, serta diakhiri dengan review untuk memastikan kesesuaian dengan kaidah bahasa, format, dan substansi yang telah ditetapkan, sehingga menghasilkan laporan yang sesuai.
Daftar Lampiran Bukti Kegiatan	1. Tersedianya dokumen pendukung kegiatan aktualisasi dan dokumentasi 2. Tersedianya laporan aktualiasi 3. Tersedianya laporan yang telah direvisi
Uraian Kegiatan Yang Dilaksanakan	
Uraian kegiatan dan keterkaitannya dengan Nilai BerAKHLAK	Berorientasi Pelayanan , menyampaikan informasi secara komunikatif agar mudah dipahami.

	Akuntabel, dengan menunjukkan tanggung jawab dalam menyajikan bukti pelaksanaan kegiatan sebagai tanggungjawab. Kompeten, berupaya memastikan dokumen dikumpulkan sesuai kebutuhan I Harmonis, menjaga komunikasi yang baik dan saling menghargai selama proses revisi dan diskusi laporan Loyal, melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi sebagai bentuk kesetiaan terhadap peran dan tanggungjawab ASN. Adaptif, bersedia menerima masukan dan melakukan perbaikan terhadap isi laporan Kolaboratif, melibatkan pihak lain seperti mentor atau atasan dalam proses perbaikan laporan untuk hasil optimal.
Teknik Aktualisasi yang dipergunakan	Dalam kegiatan membuat laporan aktualisasi kegiatan, dilakukan dengan mengumpulkan bukti dukung atau dokumentasi terkait pelaksanaan aktualisasi, kemudian dilanjutkan dengan penulisan/perbaikan laporan aktualisasi.
Kontribusi Terhadap Unit Kerja	Kontribusi dari kegiatan penyusunan laporan aktualisasi terhadap unit kerja adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas, memperkuat budaya kerja yang berlandaskan BerAKHLAK, serta menyediakan dokumentasi yang dapat dijadikan referensi untuk evaluasi dan perbaikan selanjutnya.

Dampak jika Aktualisasi tidak dilakukan dengan NDS	Jika kegiatan aktualisasi tidak dilakukan sesuai dengan nilai-nilai BerAKHLAK, maka laporan bisa jadi tidak jelas, tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan kurang bermanfaat bagi unit kerja. Tanpa nilai seperti akuntabel, kompeten, dan kolaboratif, proses kerja bisa terhambat, tidak rapi, dan tidak mendukung peningkatan pelayanan. Akibatnya, kualitas kerja menurun dan tujuan pembentukan karakter ASN tidak tercapai.
--	---

Output Kegiatan 7 Tahap 1





Output Kegiatan 7 Tahap 2



